

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

Nia Faradilla  
NIM 51.14.1.064

Program Studi  
Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

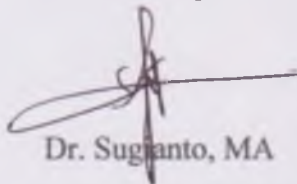
NIA FARADILLA

NIM. 51.14.1.064

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada Jurusan Akuntansi Syari'ah

Medan, 22 Oktober 2018

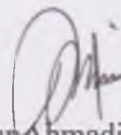
Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA

NIP. 196706072000031003

Pembimbing II

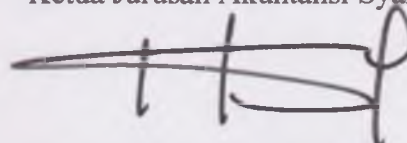


Nur-Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIB. 1100000093

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



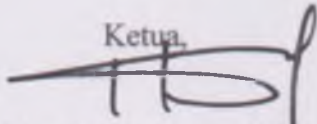
Hendra Harmain, SE, M. Pd

NIP.197305101998031003

Skripsi berjudul “**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**”, Nia Faradilla, NIM 51141064 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 31 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

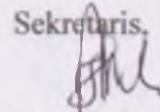
Medan, 31 Oktober 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd  
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



Kamila, SE, Ak, M.Si  
NIP. 197910232008012014

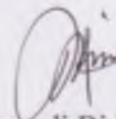
Anggota

Pembimbing I



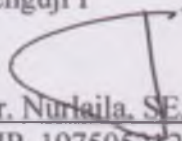
Dr. Sugianto, MA  
NIP. 196106072000031003

Pembimbing II



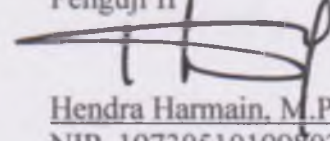
Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si  
NIB. 1100000093

Penguji I



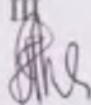
Dr. Nurlaila, SE, MA  
NIP. 197505212001122002

Penguji II



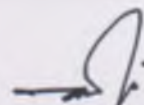
Hendra Harmain, M.Pd  
NIP. 197305101998031003

Penguji III



Kamila, SE, Ak, M.Si  
NIP. 197910232008012014

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, M. Ag  
NIP. 197605072006041002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Nia Faradilla  
NIM : 51.14.1.064  
Tempat/Tgl Lahir : Payageli, 25 Juni 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Binjai Km. 10 Gg. Damai Lr. VII Rotan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia**" benar karya asli saya, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Nia Faradilla

## ABSTRAK

Nia Faradilla. NIM: 51141064, Judul Skripsi: Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Di bawah Bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Dr. Sugiarto, MA** dan Pembimbing Skripsi II Bapak **Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, ukuran Komite Audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Subjek penelitian ini adalah *annual report* yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2015-2017 sehingga diperoleh sebanyak 11 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran Dewan Direksi dan ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

*Kata Kunci: GCG, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, ukuran Komite Audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, DAR, ISR.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena Rahmat dan Hidayah-Nya serta petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul “**Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini, semoga syafaatnya akan diperoleh di akhir kelak *amin ya rabbal'alamin*.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, do'a dan dukungan dari keluarga serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Budi Winarno dan Ibunda Junarsih yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan baik materil maupun nonmateril, serta do'a yang tak pernah putus selama perkuliahan saya dan juga selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Sugianto, MA, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Nur Ahamdi Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia memberikan waktu untuk bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang memberikan pengajaran dan bimbingan yang berharga selama masa perkuliahan.
7. Keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti untuk menjadi yang terbaik.
8. Galuh Palupi yang senantiasa memberikan motivasi dengan memarahi penulis selama penulisan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
9. M. Dolly Rahmatullah S. Akun dan Nika Wijaya, Tim Hore-hore penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan tak henti-hentinya yang kepada penulis selama penulisan skripsi yang penuh dengan drama ini.
10. Tim Pejuang Skripsi, M. Anwar Zaky, Suprianto, Dhuhasyami Rama, Eri Diansyah yang saling memberikan dukungan.
11. Teman-teman AKS-B angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.
12. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Penulis,

Nia Faradilla

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan, Manfaat dan Kontribusi Penelitian .....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teori .....	8
1. Teori Legitimasi .....	8
2. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	10
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
b. Tujuan Pelaksanaan GCG .....	11
c. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> .....	11
a) Ukuran Dewan Komisaris .....	15
b) Ukuran Dewan Direksi .....	16
c) Ukuran Komite Audit.....	17
d) Ukuran Dewan Pengawas Syariah .....	18
e) Kepemilikan Institusional .....	19
f) Kepemilikan Manajerial .....	19
g) Leverage .....	20
B. <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) .....	21

C. Penelitian Terdahulu .....	25
D. Kerangka Pemikiran .....	31
E. Hipotesis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber data .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	35
D. Definisi Operasional .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia .....	44
B. Hasil Penelitian .....	46
1. Deskripsi Variabel .....	46
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	48
3. Hasil Pengujian Hipotesis .....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
C. Keterbatasan Penelitian .....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Indeks ISR.....	23
2. Penelitian Terdahulu .....	27
3. Daftar Bank Umum Syariah (Bus) Yang Memenuhi Kriteria .....	36
4. Definisi Operasional Variabel.....	37
5. Analisis Statistik Deskriptif .....	47
6. Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	50
7. Uji Heteroskedastisitas <i>Spearman</i> .....	50
8. Uji Autokorelasi <i>Runs Test</i> .....	53
9. Uji Hipotesis Parsial (Uji T) .....	54
10. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) .....	56
11. Uji Koefisien Determinasi.....	57
12. Uji Model .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Pemikiran.....	32
2. Grafik Histogram .....	48
3. Grafik <i>Normal P-P Plot</i> .....	49
4. Grafik <i>Scatterplot</i> .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka seharusnya dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal tersebut memberikan kesempatan besar dalam pengembangan konsep syariah di kehidupan masyarakat Indonesia. Dewasa ini sejumlah cendekiawan sudah mulai mencoba menyusun standar normatif untuk keuangan berbasis syariah yang di dalamnya termasuk juga pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Informasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi *stakeholder* untuk mengambil keputusan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan perlu dilakukan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Informasi yang seringkali diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah mengenai tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan akan mengungkapkan praktik tanggung jawab sosial agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat diketahui berbagai pihak berkepentingan. Dengan mengungkapkan informasi mengenai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya juga turut memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Praktik pengungkapan CSR sendiri telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia termasuk juga industri perbankan. Pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah.<sup>1</sup>

Perbankan syariah merupakan sektor yang patut diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank

---

<sup>1</sup> Winda Siti Haridatma, "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 2

umum syariah dengan memiliki 13 bank dan 1827 kantor. Hal ini semakin jelas, keberadaan bank umum syariah sudah mendapat kepercayaan oleh masyarakat sebagai lembaga intermediasi dalam segi keuangan.<sup>2</sup>

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan hadis. Mengenai praktek CSR, prinsip-prinsip syariah menjadikan dasar bagi perbankan syariah dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut; prinsip adil dan kemitraan perbankan syariah mengharuskan mereka untuk beroperasi dengan porsi keuntungan yang jelas. Sementara prinsip transparan meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip universal, islam sebagai rahmatan lil 'alamin sudah seharusnya menghindari dari kerusakan dan kemiskinan.

Khasanah dan Yulianto menjelaskan dalam hal pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi, pada saat ini mulai berkembang standar pengungkapan CSR untuk perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) standar ini sering disebut dengan *Islamic Social reporting (ISR)*.<sup>3</sup>

ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa yang kemudian dikembangkan lagi oleh Othman et al di Malaysia. Indeks ISR berisi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI. Haniffa menyatakan bahwa selama ini pengukuran CSR *disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Index (GRI)*. Padahal saat ini banyak diperbincangkan mengenai ISR yang sesuai dengan prinsip Syariah. Haniffa juga mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga

---

<sup>2</sup> Statistik Perbankan Syariah Juni 2018 diunduh melalui situs [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

<sup>3</sup> Khasanah dan Yulianto, "Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Akuntansi*, 2015, h. 2.

untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat<sup>4</sup>. Sugianto dan Nurlaila juga mengungkapkan bahwa Praktik ISR pada pelaporan Bank Syariah juga masih lemah.<sup>5</sup>

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG). *Corporate governance* dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Struktur GCG menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam suatu korporasi, diantaranya adalah dewan direksi, manajer, pemegang saham serta pemegang kepentingan lainnya.<sup>6</sup> Akan tetapi, pelaksanaan GCG masih menjadi kendala di berbagai negara berkembang. Hal tersebut disebabkan karena semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan secara efisien dan akuntabilitas, baik menyangkut internal, negara, hukum maupun *stakeholder* lainnya.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian tentang GCG dan ISR telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lutfan<sup>8</sup>, menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR, Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR, Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan, *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan. Lutfan juga mengungkapkan bahwa tingkat *Leverage* yang relatif tinggi akan mengurangi pengungkapan sosial perusahaan demi menghindari pemeriksaan dari kreditur sehingga pengungkapan

---

<sup>4</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 3.

<sup>5</sup> Sugianto dan Nurlaila, "*The Integration of Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) In Islamic Bank Financial Statement*", *Proceedings of ICGA*, 2016, h. 10.

<sup>6</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*", h. 2.

<sup>7</sup> Masykuroh, "Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 12, 1 Mei 2012, h. 113-132.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 4-6

ISR yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Winda<sup>9</sup>, menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil penelitiannya, Lutfan mengungkapkan bahwa ISR merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, khususnya bagi para masyarakat muslim<sup>10</sup>. Winda mengungkapkan bahwa penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah masih terbatas. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan ISR, tidak ditemukan adanya hasil yang konsisten dan masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mencoba menguji pengaruh GCG terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah. Untuk membedakan dengan penelitian yang lain, maka penulis menggunakan Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage* sebagai variabel independen dari tahun 2015-2017. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia menarik untuk dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan GCG masih menjadi kendala karena kurangnya pengawasan secara efisien dan akuntabilitas yang menyangkut dengan *stakeholder*.
2. Pengungkapan CSR pada bank syariah masih mengacu pada GRI.
3. Praktik ISR pada pelaporan Bank Syariah masih lemah.

---

<sup>9</sup>Winda Siti Haridatma, "Pengaruh Elemen *Good Corporate*, h. 59

<sup>10</sup>Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*, h. 3.

<sup>11</sup>Winda Siti Haridatma, "Pengaruh Elemen *Good Corporate*, h. 8.

4. Terdapat pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR.
5. Terdapat pengaruh kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan ISR.
6. Tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan sosial perusahaan sehingga pengungkapan ISR yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian serta keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah. Dalam penelitian ini dibatasi pada satu variable terikat, yaitu pengungkapan ISR dan 7 variabel bebas dari GCG, yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage*. Sedangkan data pengungkapan ISR Bank Umum Syariah di Indonesia dibatasi pada tahun 2015-2017.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?

6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
7. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?
8. Apakah Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum syariah di Indonesia?

## **E. Tujuan, Manfaat dan Kontribusi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- e. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- f. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- g. Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- h. Pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang pengungkapan ISR pada perusahaan, khususnya di perbankan syariah. Selain itu, sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **b. Bagi Perusahaan Perbankan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan ISR pada perbankan Syariah di Indonesia dan menjadi tambahan bahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan ISR.

### **c. Bagi Pembaca dan Akademik.**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.

## **3. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian bagi perkembangan akuntansi syariah maupun ekonomi islam, yaitu penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam perluasan materi ajar dalam Akuntansi Syariah maupun Ekonomi Islam.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.<sup>1</sup>

Teori legitimasi adalah teori yang melandasi pengungkapan CSR. Menurut Rani dalam Bachtiar, dalam teori legitimasi, dinyatakan bahwa suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan segala aktivitasnya jika itu memang yang diharapkan oleh komunitas untuk menjamin operasi perusahaan berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat diartikan sebagai alat bagi perusahaan untuk berperilaku dalam koridor-koridor yang secara sosial dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat.<sup>2</sup>

Legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wacana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.<sup>3</sup>

Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur GCG, dalam hal ini adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage* dengan pengungkapan CSR

---

<sup>1</sup> Nor Hadi, “*Corporate Social Responsibility*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 87.

<sup>2</sup> Bachtiar Yusuf, “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah, (Skripsi STAIN Pekalongan, 2016), h. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 17.

perbankan syariah<sup>4</sup>. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa mendatang. Teori legitimasi berguna bagi perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas serta kinerjanya bisa diterima oleh masyarakat.

Amal mengungkapkan bahwa perusahaan menggunakan laporan tahunannya untuk menggambarkan akuntabilitas atau tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan, sehingga perusahaan yang bersangkutan bisa diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat maka akan menambah nilai perusahaan.<sup>5</sup>

Keterkaitan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah, kepemilikan konstitusional dan kepemilikan manajerial dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR, agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Sementara keterkaitan faktor *leverage* dengan pengungkapan ISR berdasarkan teori legitimasi dapat dijelaskan melalui rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih rendah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Amirul Khoirudin, “*Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), h. 15.

<sup>5</sup> Amal, “Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 7.

<sup>6</sup> Bachtiar Yusuf, “Pengaruh *Good*”, h. 18.

<sup>7</sup> Lutfan Dwi Asyhari, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 3.

## 2. *Good Corporate Governance (GCG)*

### a. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

*Good corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), yaitu seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas<sup>8</sup>.

GCG dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>9</sup>

Menurut Indra Surya, GCG terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai dan sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholder*.<sup>10</sup>

Dalam bukunya, Kwat menyatakan GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu<sup>11</sup>:

- 1) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya
- 2) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

---

<sup>8</sup> Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), h. 35.

<sup>9</sup> Desy Komalasari dan Yane Devi Anna, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan yang Listing di BEI", (Jurnal, Institut Manajemen Telkom, 2012), h. 5.

<sup>10</sup> Indra Surya, *Penerapan Good Corporate Governance*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.25

<sup>11</sup> Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 262.

### **b. Tujuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Menurut E. John dalam Winda, menjelaskan bahwa ada 5 tujuan pelaksanaan GCG antara lain<sup>12</sup>:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pemegang saham
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

### **c. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)**

Dalam PBI No. 11/33/2009 dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Prinsip GCG adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- 1) Keterbukaan (*transparency*) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.

Dalam hubungannya dengan islam, konsep keterbukaan informasi telah diungkapkan oleh Allah dalam potongan ayat berikut:

---

<sup>12</sup> Winda Siti Haridatma, "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017), h. 14

<sup>13</sup> Indra surya, *Penerapan Good Corporate Governance*, h. 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ .....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.... (Q.S. Al-Baqarah : 282)<sup>14</sup>

- 2) Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Konsep kejelasan pelaksanaan pertanggungjawaban ini, Allah menjelaskannya dalam ayat berikut :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ

وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

<sup>14</sup>AlQur'an dan Terjemahannya

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah : 105)<sup>15</sup>

- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfaal : 27)<sup>16</sup>

- 4) Professional (*professional*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah
- 5) Kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Al-Qur'an, prinsip ini dijelaskan dalam surah An-Nisaa ayat 58:

<sup>15</sup> AlQur'an dan terjemahannya

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa: 58)<sup>17</sup>

Selain itu hadis berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ (رواه الطبران)

Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah dan tuntas) (HR. Thabrani).<sup>18</sup>

Dalam hadis di atas telah dijelaskan bahwa seharusnya kita dalam melakukan suatu pekerjaan harus tepat, terarah dan tuntas atau dilakukan secara baik. Maka dalam hal ini, GCG yang berprinsip seperti yang disebutkan di atas, harus dilakukan secara tepat, terarah dan tuntas.

GCG dalam islam bukanlah hal yang asing. Prinsip GCG seperti tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlak islam dan seorang muslim dalam aktivitasnya. Dalam islam

<sup>17</sup>Al-Qur'an dan terjemahannya

<sup>18</sup>Susanto Edogawa, "GCG menurut Perspektif Islam". Diunduh melalui situs <http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html>

kepentingan utama adalah pertanggungjawaban karena merupakan segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukannya.<sup>19</sup>

GCG yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage*. Semua variabel tersebut akan diteliti terhadap pengungkapan ISR.

#### a) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi dengan sebaik-baiknya.<sup>20</sup>

Khoiruddin dalam Bachtiar menyatakan bahwa terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu<sup>21</sup>:

##### (1) Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh waktu (non direktur eksekutif).

##### (2) Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem ini berasal dari sistem hukum *Continental* Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan

---

<sup>19</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya : Risalah Gusti, Cet. 2), h. 217.

<sup>20</sup> Susi Susanti, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics and Household", (Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2013), h.10.

<sup>21</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh Good, h. 24-25

pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.

Fungsi dan peran dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan yaitu direksi. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial.<sup>22</sup>

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, namun tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya.<sup>23</sup>

Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.<sup>24</sup> Semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin mudah untuk mengendalikan dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Serta banyak memberikan kontribusi dan saran kepada pihak manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya yang lebih luas.

#### **b) Ukuran Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan Terbatas, dapat berasal dari seseorang yang memiliki perusahaan tersebut ataupun orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good*", h. 25

<sup>23</sup> Amirul, "Pengaruh *Good Corporate*", h. 41.

<sup>24</sup> Gugik Indra Wibawa, "Pengaruh *Elemen Good Corporate Governance terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility*", (Jurnal Ekonomi, Universitas Dian Nuswantoro, 2012), h.7.

<sup>25</sup> Annisa Nurazizah, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola dan Prediksi Kebangkrutan Terhadap Manajemen Laba", (Skripsi, Universitas Islam Bandung), h. 26

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi umumnya berhubungan dengan implikasi dan kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direksi yang bertugas sebagai pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan.

### c) Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pengangkatan serta pemberhentian komite audit dilakukan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Maksud dalam Lutfan, menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab utama untuk prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.<sup>27</sup>

Menurut Widiyanto dalam Lutfan, komite audit termasuk salah satu komite yang memiliki fungsi penting dalam *corporate governance*. Komite audit memiliki fungsi untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan untuk pihak eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan.<sup>28</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan komite audit di sini adalah jumlah komite audit yang ada di masing-masing bank.

---

<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diakses melalui situs <https://www.ojk.go.id>

<sup>27</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*", h. 16.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.17

#### d) Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. DPS dalam perbankan syariah merupakan pembeda dari perbankan konvensional. Kesyariahan sebuah perbankan syariah terletak pada pundak mereka. Kuat dalam Bachtiar menyebutkan bahwa fungsi dan peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah adalah<sup>29</sup>:

- (1) Mengawasi jalannya lembaga syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah.
- (2) Dewan syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan syariah.
- (3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru.
- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan masyarakat.

Posisi DPS dalam struktur organisasi di perbankan syariah setara dengan dewan komisaris. Di Indonesia DPS bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia. DPS memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.<sup>30</sup>

DPS yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai

---

<sup>29</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate*", h. 27.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 26

syariat Islam sehingga DPS dapat mempengaruhi pengungkapan ISR bank syariah.<sup>31</sup>

#### **e) Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan institusi lain.

Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran kepemilikan institusional menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi-institusi lainnya.<sup>32</sup>

#### **f) Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen, apabila di dalam sebuah perusahaan ada kepemilikan manajerial, maka dapat diprediksikan perusahaan akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari publik. Jika pimpinan tim manajemen ada yang berperan sebagai pemegang saham maka diprediksikan akan memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan tanggung jawab sosialnya,

---

<sup>31</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate*", h. 28

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 29

dan melaporkan tanggung jawab itu dalam bentuk laporan tahunan. Pendapat lain mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.<sup>33</sup>

Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang mempunyai saham perusahaan tentu akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif pula tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai-nilai perusahaan.<sup>34</sup>

#### **g) Leverage**

Menurut Adawiyah dalam Lutfan, rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi. *Leverage* memiliki arti penting dalam perusahaan, karena dapat diketahui dampak *leverage* terhadap profitabilitas. Semakin tinggi tingkat *leverage* maka besar kemungkinan dilanggarnya perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Tarjo dalam Lutfan menjelaskan bahwa Rasio *leverage* menggambarkan sumber dan operasi yang digunakan oleh perusahaan<sup>35</sup>. Menurut Hari Widianto dalam Lutfan *Leverage* merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung oleh kreditur dalam membiayai aset perusahaannya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut sangat tergantung pada pinjaman perusahaan lain atau luar untuk membiayai asetnya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*, h. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.19.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 20

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang jika sebuah perusahaan dilikuidasi. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih rendah.<sup>37</sup>

Rasio untuk mengukur tingkat *leverage* dalam penelitian ini menggunakan rasio hutang. Pengukuran rasio ini dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut<sup>38</sup>:

$$\text{Debt to Asset Ratio} \\ (\text{DAR}) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

### 3. *Islamic Social Reporting (ISR)*

Menurut AAOFI, *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika sebagai lembaga finansial baik itu bagi individu maupun bagi institusi.<sup>39</sup>

Dalam islam konsep CSR menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menerapkan konsep CSR berdasarkan syariah Islam.<sup>40</sup>

Seperti dalam Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 berikut:

<sup>37</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*", h. 20-21

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>39</sup> Erdhina Putri Riyanti, "Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman Antar Bank Umum Syariah di Indonesia", (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013), h. 28.

<sup>40</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung Jawab Sosial Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*", (Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Jendral Sudirman, 2010), h. 4

\* لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>41</sup>

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari negara, perusahaan

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya

swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun.<sup>42</sup>

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (ISR). Salah satu cara menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan ISR. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan.<sup>43</sup>

Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat. Status kepatuhan Syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan *gharar* serta aspek-aspek sosial seperti *shodaqoh*, *waqof*, *qordul hasan* sampai dengan pengungkapan peribadatan di lingkungan perusahaan. Indeks ISR tersebut ialah dapat dilihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Indeks ISR**

<i>Item of Disclosure</i>	
<b>1</b>	<b>Pendanaan dan Investasi (<i>Finance and Investment</i>)</b>
1	Aktivitas <i>Riba</i>
2	<i>Gharar</i>
3	Zakat
4	<i>Policy on Late Repayments and insolvent client/bads debt written off</i>
5	<i>Current value balance sheet</i>
6	<i>Value added statement</i>
<b>2</b>	<b>Produk dan Jasa (<i>Product and Service</i>)</b>
7	Produk ramah lingkungan
8	Status halal atau syariah dalam produk
9	Keamanan dan kualitas produk

<sup>42</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate*", h. 33.

<sup>43</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung Jawab", h. 5.

10	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku
<b>3</b>	<b>Karyawan (<i>Employee</i>)</b>
11	Karakteristik pekerjaan
12	Pendidikan dan pelatihan
13	Kesempatan yang sama
14	Keterlibatan Karyawan
15	Kesehatan dan keselamatan kerja
16	Lingkungan kerja
17	Perekrutan khusus
18	Sholat berjamaah antar pejabat tertinggi dengan tingkat manajer yang lebih rendah dan menengah
19	Karyawan muslim diizinkan sholat wajib selama waktu dan puasa tertentu selama bulan Ramadhan
20	Tempat ibadah untuk karyawan
<b>4</b>	<b>Sosial (<i>Community Involvement</i>)</b>
21	Pemberian Donasi ( <i>Sodaqoh</i> )
22	Wakaf
23	Pinjaman untuk kebaikan ( <i>Qardh Hassan</i> )
24	Sukarelawan dari kalangan karyawan
25	Pendidikan
26	Pekerjaan lulusan
27	Kegiatan kepemudaan
28	Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu
29	Kepedulian terhadap anak
30	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
31	Sponsor kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga
<b>5</b>	<b>Lingkungan hidup (<i>Environment</i>)</b>
32	Konservasi lingkungan

33	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah
34	Pencemaran lingkungan
35	Pendidikan lingkungan
36	Produk/proses lingkungan terkait
37	Audit lingkungan
38	Kebijakan manajemen lingkungan
<b>6</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)</b>
39	Status kepatuhan syariah
40	Struktur kepemilikan
41	Struktur direksi
42	Aktivitas terlarang, seperti praktek monopoli, ikhtikar, manipulasi harga, kecurangan dalam bisnis, perjudian
43	Kebijakan anti korupsi

Sumber : Othman, R., Md Thani, A., & Ghani, E. K, *Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia*, *Research Journal of International Studies*, 12: 2009, h. 4-20.

Pengecekan dan perhitungan ISR menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item ISR dalam *instrument* penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Untuk mendapatkan indeks ISR, total skor untuk setiap perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan dari perusahaan tersebut. Rumus penghitungan ISR adalah :

Keterangan :

$$\text{ISRDI}_j = \frac{\sum x_{ij}}{N_j}$$

ISRDI<sub>j</sub> = ISR *Disclosure Indeks* perusahaan j

N<sub>j</sub> = Jumlah item yang diungkap oleh perusahaan j

Xij = Dummy variabel : 1 = jika item i diungkapkan, 0 jika item i tidak diungkapkan.<sup>44</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh penelitian lain. Adapun penelitian-penelitian tersebut di antaranya penelitian Khasanah dan Yulianto<sup>45</sup>, Soraya Fitria dan Dwi Hartanti<sup>46</sup>, Sugianto dan Nurlaila<sup>47</sup>, Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani<sup>48</sup>, Amirul Khoiruddin tahun<sup>49</sup>, Intan Gestari<sup>50</sup>, Bachtiar Yusuf<sup>51</sup>, Lutfan Dwi Asyhari<sup>52</sup>, Winda Siti Haridatma<sup>53</sup>. Secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

---

<sup>44</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate*", h. 37

<sup>45</sup> Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto, "*Islamic Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah, (Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Semarang, 2015).

<sup>46</sup> Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, "Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks* dan *Islamic Social Reporting Indeks*", (SNA Akuntansi XIII Purwokerto, Universitas Indonesia, 2010)

<sup>47</sup> Sugianto dan Nurlaila, "*The Integration of Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) In Islamic Bank Financial Statement*", *Proceedings of ICGA*, 2016, h. 10.

<sup>48</sup> Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani, "Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia", (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam vol. 10 No. 1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

<sup>49</sup> Amirul Khoiruddin, "Pengaruh elemen *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013).

<sup>50</sup> Intan Gestari, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

<sup>51</sup> Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah, (Skripsi STAIN Pekalongan, 2016)

<sup>52</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, h. 1.

<sup>53</sup> Winda Siti Haridatma, "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017).

**Tabel 2.2**  
**Penelitian-penelitian terdahulu**

Peneliti	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
Khasanah dan Yulianto (2015)	Variabel terikat: Pengungkapan ISR Variabel bebas: <i>Account Holders</i> , kepatuhan syariah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Bank umum syariah di Indonesia tahun 2010-2013 Analisis deskriptif dan analisis inferensial	<i>Investment Account Holders</i> dan kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah tidak berpengaruh
Soraya Fitria dan Dwi Hartanti (2010)	Variabel : GRI dan ISR Indeks	Bank Syariah A, B, C yang menguasai 65% pangsa pasar perbankan syariah dari segi	GRI indeks memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan ISR Indeks

		<p>kepemilikan aset pada tahun 2008</p> <p>Bank konvensional X, Y, Z yang menguasai 58% pangsa pasar perbankan konvensional dari segi kepemilikan aset pada tahun 2008</p>	
Sugianto dan Nurlaila (2016)	Variabel : Pengungkapan ISR	Bank umum syariah Indonesia tahun 2014-2015	Pengungkapan ISR masih lemah
Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani (2017)	Variabel terikat: Pengungkapan ISR Variabel bebas: Jumlah anggota dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi, rangkap jabatan dan jumlah anggota DPS, kepemilikan institusional dan asing	Bank syariah Indonesia dan Bank syariah Malaysia tahun 2012-2014 Analisis regresi panel	Jumlah anggota dan jumlah rapat komite remunerasi dan nominasi berpengaruh positif, sedangkan rangkap jabatan dan jumlah anggota DPS, kepemilikan institusional dan asing tidak

			berpengaruh
Amirul Khoiruddin (2013)	Variabel terikat: Pengungkapan ISR Variabel bebas: Ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah	Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2010-2011 Analisis deskriptif, analisis inferensial	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh
Intan Gestari (2014)	Variabel terikat: ISR Variabel bebas: Ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dps, frekuensi rapat dps, kualitas auditor, profitabilitas	Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2009-2013 Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis : analisis regresi berganda	Ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap ISR
Bachtiar Yusuf (2016)	Variabel terikat: Pengungkapan ISR Variabel bebas : Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional,	Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2014 Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh, kepemilikan

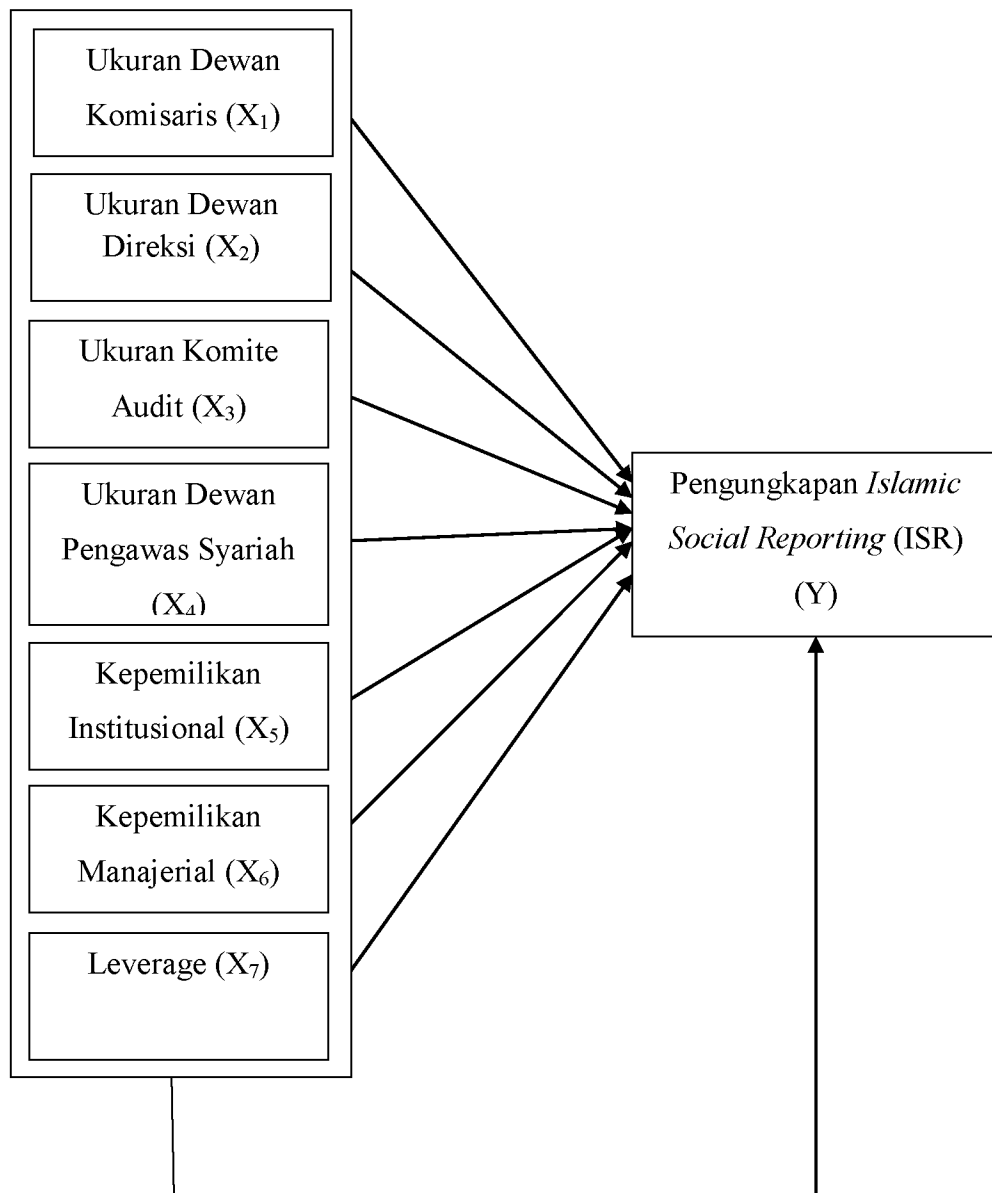
	profitabilitas, ukuran dewan komisaris	berganda	institusional tidak berpengaruh, profitabilitas tidak berpengaruh
Lutfan Dwi Asyhari (2016)	Variabel terikat : Variabel bebas : Ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan pengawas Syariah, kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> , likuiditas	Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014 Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda	Ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan, komposisi dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan, ukuran dewan pengawas Syariah berpengaruh positif dan tidak signifikan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan, <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan

Winda Siti Hardiatma (2017)	Variabel terikat : Pengungkapan ISR Variabel bebas : Ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas Syariah	Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2015 Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda	Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan, ukuran dewan pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan
-----------------------------------	--	--	---

Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu pengungkapan ISR dan 7 variabel independen, yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage*. Sedangkan sampel Bank Umum Syariah Indonesia pada tahun 2015-2017.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen (X), yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage* terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengungkapan ISR. Secara sistematis dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>54</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>01</sub>: Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

H<sub>a1</sub>: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>02</sub>: Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>a2</sub>: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>03</sub>: Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>a3</sub>: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>04</sub>: Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>a4</sub>: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>05</sub>: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>a5</sub>: Kepemilikan konstitusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>06</sub>: Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

---

<sup>54</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 96

H<sub>a6</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>07</sub>: *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>a7</sub>: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

H<sub>08</sub>: Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

ISR

H<sub>a8</sub>: Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam rangka (*quantitative*) dan melakukan analisis dengan prosedur statis dan permodelan sistematis.<sup>1</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2017.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang diakses melalui *website* masing-masing bank.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek (satuan atau individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dari populasi tersebut ditentukan besar sampel yang akan diambil sehingga dapat terrepresentatif terhadap populasi. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di *www.bi.go.id* dan menerbitkan

---

<sup>1</sup> Sujuko Efferin, et.al, *Metode Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 47.

*annual report* tahun 2015-2017 yang dapat diakses melalui *website* masing-masing bank.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi Kriteria**

No	Nama Bank
1	BCA Syariah
2	BJB Syariah
3	Bank Muamalat Indonesia
4	BNI Syariah
5	BRI Syariah
6	Bank Syariah Bukopin
7	Bank Syariah Mandiri
8	Maybank Syariah
9	Bank Mega Syariah
10	Panin Bank Syariah
11	Bank Victoria Syariah

#### **D. Definisi Operasional**

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik.<sup>2</sup>

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

##### **1. Variabel Independen**

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau

---

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke 2, ), h. 233.

timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>3</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris ( $X_1$ ), ukuran dewan direksi ( $X_2$ ), ukuran komite audit ( $X_3$ ), ukuran dewan pengawas syariah ( $X_4$ ), kepemilikan institusional ( $X_5$ ), kepemilikan manajerial ( $X_6$ ), dan *leverage* ( $X_7$ ).

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas<sup>4</sup>. Variabel terikat pada penelitian ini pengungkapan CSR menggunakan indeks ISR yang disimbolkan dengan “Y”.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
1	Pengungkapan ISR	Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan perusahaan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan	Rasio	$ISRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{N_j}$
2	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang	Rasio	Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 59.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 59.

		disebutkan dalam laporan tahunan		
3	Ukuran Dewan Direksi	Jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan	Rasio	Jumlah Total Anggota Dewan Direksi
4	Ukuran Komite Audit	Jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan	Rasio	Jumlah Total Komite Audit
5	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang dimiliki perusahaan	Rasio	Jumlah Total Anggota Dewan Pengawas Syariah
6	Kepemilikan Institusional	persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar	Rasio	Kepemilikan institusional = $\frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$
7	Kepemilikan manajerial	presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi dengan jumlah saham yang	Rasio	Kepemilikan manajerial = $\frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$

		beredar		
4	<i>Leverage</i>	Kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain	Rasio	Debt to Asset Ratio (DAR) = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$

Sumber : data diolah

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bermaksud untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan. Dalam melakukan studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dengan membaca literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Riset Internet (*Online Research*)

Teknik pengumpulan data yang berasal dari situs-situs atau *website* yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang diteliti.

## F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan dengan beberapa tahapan berikut.

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan rata-rata, median, maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Dalam statistik parametrik data harus terdistribusi secara normal.

### 2. Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 20. Pengujian asumsi klasik dilakukan terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Ada beberapa cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

Dasar pengambilan menggunakan analisis grafik adalah dengan melihat pola sebaran data disekitar garis diagonal. Jika data tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka disimpulkan data tersebut normal. Sedangkan dasar pengambilan menggunakan analisis statistik yaitu dengan membandingkan nilai sig dengan tingkat kepercayaan ( $\alpha=0.05$ ). Jika nilai sig lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $\text{sig} \geq \alpha$ ), maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Analisis deteksi adanya masalah heteroskedasitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik *scatterplot*.

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan grafik *scatterplot* adalah dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik-titik dalam grafik. Apabila titik-titik tersebut membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedasitas. Sedangkan dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji *Spearman Rho* adalah dengan membandingkan nilai sig variabel

independen dengan nilai  $\alpha$  (0,05). Apabila nilai sig lebih besar  $\alpha$  ( $\text{sig} > \alpha$ ), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.<sup>5</sup>

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$  jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test*.

## 3. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Signifikansi

#### 1) Uji Statistik $t$

Uji statistik  $t$  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi secara 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut.<sup>6</sup>

- 1) Jika nilai signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut

---

<sup>5</sup> Singgih Santoso, *Metode Penelitian Kuantitatif: Plus Aplikasi Program SPSS* (Ponorogo: Pusat Penerbitan Fakultas Ekonomi (P2-FE) Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2010), hlm. 139.

<sup>6</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit-UNDIP), h. 98.

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai  $T_{hitung}$  berada pada daerah penerimaan  $H_0$  atau terletak diantara nilai tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian, bila nilai  $T_{hitung}$  lebih kecil atau sama dengan ( $\leq$ ) dari nilai tabel, maka  $H_0$  diterima. Nilai  $T_{hitung}$  adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau negatif nilainya.<sup>7</sup>

## (2) Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage*, mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu ISR. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Bila signifikansi  $F < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima yang berarti koefisien regresi signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Bila signifikansi  $F > 0.05$  maka  $H_0$  atau  $H_a$  diterima atau ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## 3) Uji $R^2$ atau Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara variabel salah satu alat analisis yang bisa digunakan adalah koefisien determinasi. Dengan koefisien determinasi ini kita bisa mengetahui seberapa besar hubungan variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), h. 95.

besar perubahan atau variabel-variabel yang lain. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### **b. Uji Model**

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui linieritas hubungan dua atau lebih variabel dependen. Dan dapat pula digunakan untuk memprediksi harga variabel dependen jika harga variabel independen diketahui.<sup>8</sup>

Persamaan regresi yang digunakan yaitu :

$$ISR = \alpha + bDK + bDD + bKA + bDPS + bKI + bKM + bDAR + e$$

Dimana :

$Y = \text{Islamic Social Reporting}$

$\alpha = \text{Konstanta}$

$b = \text{Koefisien regresi model}$

$DK = \text{Dewan Komisaris}$

$DD = \text{Dewan direksi}$

$KA = \text{Komite audit}$

$DPS = \text{Dewan Pengawas Syariah}$

$KI = \text{Kepemilikan Institusional}$

$KM = \text{kepemilikan manajerial}$

$DAR = \text{Debt to Asset Ratio}$

$e = \text{Error term}$

---

<sup>8</sup> Rusydi Ananda, *Statistik Pendidikan*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), h. 91.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia**

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (*Bait At-Tamwil Salman ITB*) dan di Jakarta (*Koperasi Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin

signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang *dilaunching* pada Pasar Rakyat Syariah 2014. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.<sup>1</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Variabel

Deskriptif data dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi, nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.1.

---

<sup>1</sup>Sejarah Perbankan Syariah, diunduh melalui situs <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> pada 22 oktober 2018 17:10.

**Tabel 4.1**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan_Komisaris	33	2	6	3.73	.911
Dewan_Direksi	33	3	7	4.24	1.173
Komite_Audit	33	3	7	3.91	1.208
Dewan_Pengawas_Syariah	33	2	3	2.36	.489
Kepemilikan_Institusional	33	.000	.898	.12791	.271846
Kepemilikan_Manajerial	33	.0000	.0000	.000000	0E-7
DAR	33	.076	.318	.15952	.064203
Islamic_Social_Reporting	33	.280	.674	.51782	.102145
Valid N (listwise)	33				

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa:

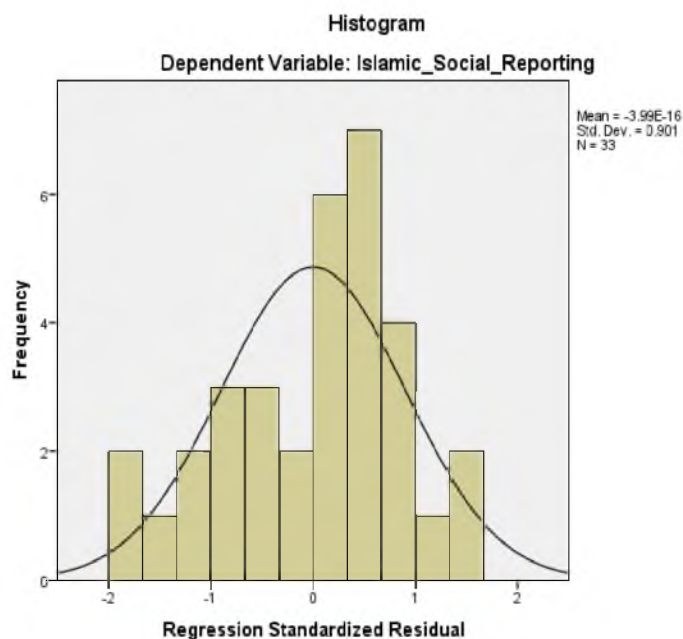
- a. Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 6, rata-rata 3.73, dan simpangan baku 0.911
- b. Variabel Dewan Direksi memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 7, rata-rata 4.24, dan simpangan baku 1.173
- c. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 7, rata-rata 3.91, dan simpangan baku 1.208
- d. Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 3, rata-rata 2.36, dan simpangan baku 0.489
- e. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum 0.000, nilai maksimum 0.898, rata-rata 0.12791, dan simpangan baku 0.2718
- f. Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum 0.000, nilai maksimum 0.000, rata-rata 0.000, dan simpangan baku 0.000
- g. Variabel DAR memiliki nilai minimum 0.076, nilai maksimum 0.318, rata-rata 0.1595, dan simpangan baku 0.0642
- h. Variabel *Islamic Social Reporting* memiliki nilai minimum 0.280, nilai maksimum 0.674, rata-rata 0.5178, dan simpangan baku 0.102.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

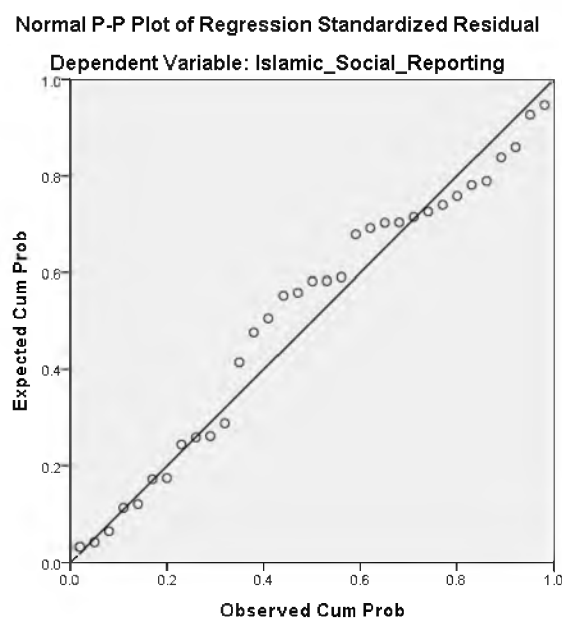
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu, metode lain dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut ini:



**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**

Dengan melihat tampilan grafik histogram pada gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal dan berbentuk simetris, tidak menceng ke kanan atau kiri.



**Gambar 4.2**  
**Grafik Normal P-P Plot**

Berdasarkan gambar 4.2 grafik *normal probability plot* untuk uji regresi dengan variabel dependen pengungkapan ISR, menunjukkan penyebaran titik-titik dan mengikuti arah garis diagonal, dapat diartikan bahwa pola distribusi menunjukkan normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan di samping menggunakan uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik. Untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan menggunakan grafik, maka uji grafik ini dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan yaitu uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Untuk menentukan data dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), nilai signifikansi harus di atas 5%. Hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.07262366
	Absolute Differences	
Most Extreme Differences	Positive	.134
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		.771
Asymp. Sig. (2-tailed)		.593

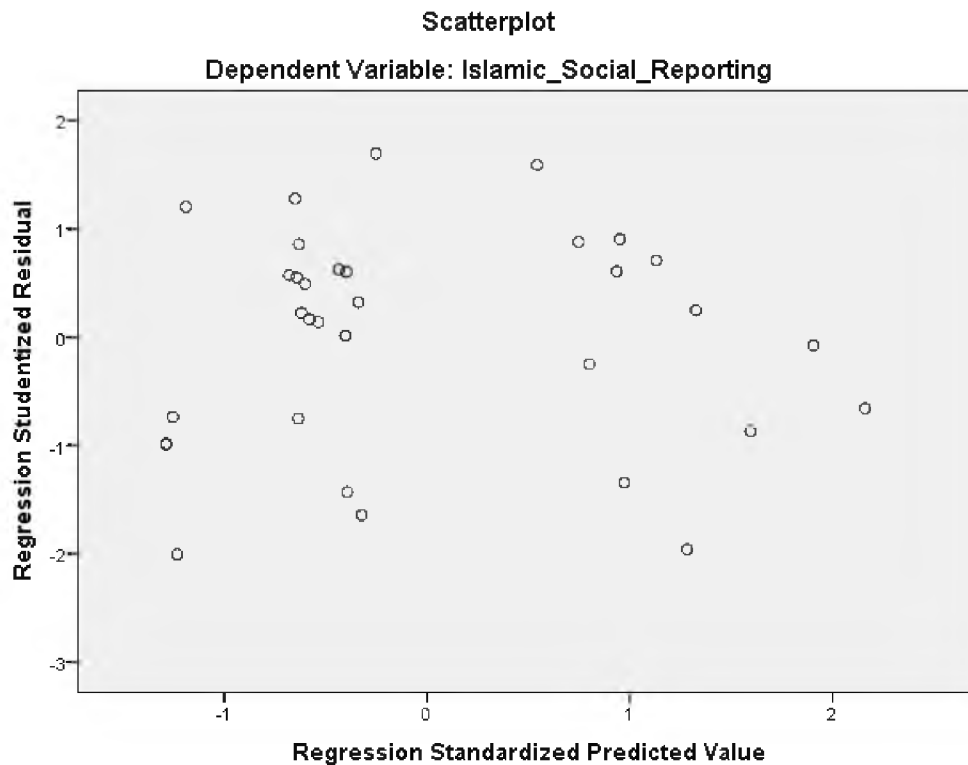
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) tingkat signifikansi pada 0.593 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan hasilnya konsisten dengan uji grafik yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi memenuhi uji normalitas.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai metode grafik dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* dari variabel terikat, dimana jika tidak terdapat pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan begitu juga sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *scatterplot* pada gambar 4.3 berikut ini:



**Gambar 4.3**  
**Grafik Scatterplot**

Dari gambar *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain metode *scatterplot*, untuk menguji heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan uji *Spearman's Rho*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0.05 maka terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Spearman's Rho* pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Uji Spearman's Rho**  
**Correlations**

		Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Dewan_Komisaris	Correlation Coefficient	-.002
		Sig. (2-tailed)	.993
		N	33
	Dewan_Direksi	Correlation Coefficient	-.051
		Sig. (2-tailed)	.780
		N	33
	Komite_Audit	Correlation Coefficient	.057
		Sig. (2-tailed)	.753
		N	33
	Dewan_Pengawas_Syariah	Correlation Coefficient	.007
		Sig. (2-tailed)	.971
		N	33
	Kepemilikan_Institusional	Correlation Coefficient	-.123
		Sig. (2-tailed)	.494
		N	33
Kepemilikan_Manajerial	Correlation Coefficient	.	
	Sig. (2-tailed)	.	
	N	33	
DAR	Correlation Coefficient	.110	
	Sig. (2-tailed)	.541	
	N	33	

Berdasarkan *output* di atas diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0.05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Run Test*. Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4**  
**Uji Autokorelasi**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.01671
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	17
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1.000 > dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

### 3. Hasil Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Signifikansi

##### 1) Uji t

Uji t yaitu pengujian yang digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya dalam model penelitian. Hasil uji parsial ditunjukkan pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.352	.093		3.788	.001
Dewan_Komisaris	.041	.024	.363	1.710	.099
Dewan_Direksi	-.060	.022	-.690	-2.782	.010
Komite_Audit	.074	.023	.881	3.263	.003
Dewan_Pengawas_Syariah	-.012	.037	-.056	-.311	.758
Kepemilikan_Institusional	.117	.068	.312	1.730	.095
DAR	-.065	.257	-.041	-.253	.802

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

$H_0$ : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

$H_a$ : Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

Nilai t tabel dengan derajat bebas (df) = 33 – 6 = 27 dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 2,051. Hasil analisis uji t yang didapat dari tabel 4.5 tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Variabel independen Ukuran Dewan Komisaris memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1.710 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.099 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 dan  $t_{hitung} |1,710| < t \text{ tabel } |2,051|$ . Hal ini bahwa  $H_{a1}$  ditolak sedangkan  $H_{01}$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

- b) Variabel independen Ukuran Dewan Direksi memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2.782 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.010 yang mana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 dan  $t_{hitung} |-2,782| > t \text{ tabel } |2,051|$ , Hal ini bahwa  $H_{a2}$  diterima sedangkan  $H_{02}$  ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
- c) Variabel independen Ukuran Komite Audit memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3.363 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 yang mana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05 dan  $t_{hitung} |3,263| > t \text{ tabel } |2,051|$ . Hal ini bahwa  $H_{a3}$  diterima sedangkan  $H_{03}$  ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
- d) Variabel independen Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -0.311 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.758 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 dan  $t_{hitung} |-0,310| < t \text{ tabel } |2,051|$ . Hal ini bahwa  $H_{a4}$  ditolak sedangkan  $H_{04}$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
- e) Variabel independen Kepemilikan Institusional memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1.730 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.095 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 dan  $t_{hitung} |1,730| < t \text{ tabel } |2,051|$ . Hal ini bahwa  $H_{a5}$  ditolak sedangkan  $H_{05}$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
- f) Variabel independen Kepemilikan Manajerial tidak teranalisis karena data terlalu kecil.

- g) Variabel independen DAR memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -0.253 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.802 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 dan  $t_{hitung} |-0,253| < t_{tabel} |2,051|$ . Hal ini bahwa  $H_{a7}$  ditolak sedangkan  $H_{07}$  diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak ada pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

## 2) Uji F

Uji simultan (uji statistik F) pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan DAR yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan ISR.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.165	6	.028	4.239	.004 <sup>b</sup>
1 Residual	.169	26	.006		
Total	.334	32			

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

b. Predictors: (Constant), DAR, Kepemilikan\_Institusional, Komite\_Audit, Dewan\_Pengawas\_Syariah, Dewan\_Komisaris, Dewan\_Direksi

$H_0$ : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

$H_a$ : Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

Dari uji ANOVA atau F test pada tabel 4.6 tersebut, didapat nilai signifikansi 0.004 yaitu lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung (F Statistik) sebesar 4.239. Diketahui nilai F tabel dengan  $df_1 = 33 - 6 = 27$ ,  $df_2 = 7$  dan tingkat signifikansi 0.05 adalah 2.37. Perhatikan bahwa:  $F_{hitung} 4.239 > F_{tabel} 2.37$  Signifikansi  $0.004 < \text{tingkat signifikansi } 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{a8}$  diterima dan  $H_{o8}$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan DAR berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

### 3) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Koefisien determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 <sup>a</sup>	.494	.378	.080569

a. Predictors: (Constant), DAR, Kepemilikan\_Institusional, Komite\_Audit, Dewan\_Pengawas\_Syariah, Dewan\_Komisaris, Dewan\_Direksi

b. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, besarnya koefisien determinasi (R Square) menunjukkan nilai 0.494 atau 49.4%, yang berarti variabel dependen dipengaruhi

variabel independen sebesar 49.4%, sedangkan sisanya 50.6% (100% - 49,4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

### b. Uji Model

Besarnya perubahan pada variabel dependen (Y) akibat perubahan pada variabel independen (X) secara parsial dapat dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh. Hasil uji model dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Model**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.352	.093		3.788	.001
Dewan_Komisaris	.041	.024	.363	1.710	.099
Dewan_Direksi	-.060	.022	-.690	-2.782	.010
1 Komite_Audit	.074	.023	.881	3.263	.003
Dewan_Pengawas_Syariah	-.012	.037	-.056	-.311	.758
Kepemilikan_Institusional	.117	.068	.312	1.730	.095
DAR	-.065	.257	-.041	-.253	.802

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$ISR = 0.352 + 0.041 - 0.060 + 0.074 - 0.012 + 0.117 - 0.065 + e$$

Persamaan tersebut memiliki makna:

- 1) Koefisien regresi Ukuran Dewan Komisaris sebesar 0.041 dan bertanda positif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen ukuran dewan komisaris dengan asumsi variabel independen

lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami peningkatan sebesar 0.041.

- 2) Koefisien regresi Ukuran dewan Direksi sebesar -0.060 dan bertanda negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen ukuran dewan direksi dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami penurunan sebesar 0.060.
- 3) Koefisien regresi Ukuran Komite Audit sebesar 0.074 dan bertanda positif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen ukuran komite audit dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami peningkatan sebesar 0.074.
- 4) Koefisien regresi Ukuran Dewan Pengawas Syariah sebesar -0.012 dan bertanda negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen ukuran dewan pengawas syariah dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami penurunan sebesar 0.012.
- 5) Koefisien regresi Kepemilikan Institusional sebesar 0.117 dan bertanda positif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen kepemilikan institusional dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami peningkatan sebesar 0.117.
- 6) Koefisien regresi kepemilikan manajerial tidak teranalisis sebab data yang terlalu kecil.
- 7) Koefisien regresi DAR sebesar -0.065 dan bertanda negatif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen DAR dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka pengungkapan ISR mengalami penurunan sebesar 0.065.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan DAR terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian, hasil pengujian menunjukkan hipotesis yang diterima pada perbankan syariah di Indonesia adalah ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.710 dengan nilai signifikansi sebesar 0.099 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%.

Hal ini tidak sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa Keterkaitan dewan komisaris dapat mendorong manajemen selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Bachtiar Yusuf<sup>2</sup> yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi ISR. Sedangkan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariska Nanda Savira<sup>3</sup>. Hal ini diduga karena Dewan Komisaris sebagai wakil *shareholders*, Dewan Komisaris membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan daripada untuk aktivitas

---

<sup>2</sup>Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah, (Skripsi STAIN Pekalongan, 2016)

<sup>3</sup>Mariska Nanda Savira, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015)

sosial. Hal ini juga bisa disebabkan karena jumlah dewan komisaris yang kurang mencukupi membuat *monitoring* yang dilakukan kurang berjalan efektif.

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan ISR**

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi menghasilkan nilai t hitung sebesar -2.782 dengan nilai signifikansi sebesar 0.010 yang mana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa keterkaitan dewan direksi dapat mendorong manajemen selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR. Sesuai fungsinya tersebut, Dewan direksi dalam hal ini telah mampu untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga dinilai mampu dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astiti Pratiwi<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

## **3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan ISR**

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran komite audit menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.363 dengan nilai signifikansi sebesar 0.003 yang mana signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan teori bahwa komite audit bertanggung jawab utama untuk prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif yang menyatakan bahwa dapat mendorong manajemen selaku

---

<sup>4</sup>Astiti Pratiwi, "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR. Dalam hal ini, komite audit telah mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai komite yang dibentuk untuk memenuhi prinsip GCG yang dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan ISR.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfan<sup>5</sup> yang menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

#### **4. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan ISR**

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah menghasilkan nilai t hitung sebesar -0.311 dengan nilai signifikansi sebesar 0.758 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini tidak sejalan dengan teori bahwa DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Mariska Nanda<sup>6</sup> yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah ada pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfan<sup>7</sup>. Hal ini mungkin disebabkan karena DPS yang masih fokus pada kegiatan operasional perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan, namun kurang memperhatikan pengungkapan ISR yang lain.

---

<sup>5</sup>Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

<sup>6</sup>Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Good Corporate Governance*.

<sup>7</sup> Lutfan Dwi Asyhari, "Pengaruh *Corporate Governance*.

### 5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menghasilkan nilai t hitung sebesar 1.730 dengan nilai signifikansi sebesar 0.095 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%.

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariska Nanda<sup>8</sup> dan Bachtiar Yusuf<sup>9</sup> yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini diduga kepemilikan institusional hanya memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan tanggung jawab kepada *stakeholders* lainnya. Selain itu, hal ini juga diduga karena institusi lain yang memiliki saham di perbankan syariah masih sedikit, sehingga belum adanya pengawasan yang optimal terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

### 6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan ISR

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mungkin dikarenakan secara statistik rata-rata jumlah kepemilikan saham manajerial pada perbankan syariah di Indonesia relatif kecil.

### 7. Pengaruh DAR terhadap Pengungkapan ISR

---

<sup>8</sup>Mariska Nanda, "Pengaruh Ukuran Perusahaan.

<sup>9</sup>Bachtiar Yusuf, "Pengaruh *Corporate Governance*.

Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa ukuran komite audit menghasilkan nilai t hitung sebesar -0.253 dengan nilai signifikansi sebesar 0.802 yang mana signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05. Dari hasil uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini tidak sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih rendah.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfan<sup>10</sup> yang menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini di duga karena, tingkat rasio DAR yang masih rendah sehingga perusahaan beranggapan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan ISR yang lebih luas.

---

<sup>10</sup>Lutfan, "Pengaruh *Corporate Governance*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* (yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage* (DAR)) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2017.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Ukuran Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
6. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
7. DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
8. Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan DAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya OJK disarankan untuk menerbitkan peraturan khusus tentang item-item pengungkapan ISR karena belum ada peraturan yang baku mengenai item tersebut.
2. Bagi Bank yang belum melakukan pengungkapan ISR agar memperbaiki pelaporan pada periode selanjutnya, sedangkan bank yang telah melakukan pengungkapan ISR diharapkan agar memperhatikan pengungkapan ISR untuk tahun selanjutnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah atau mengganti variabel lain untuk mewakili pengungkapan ISR serta memperpanjang periode penelitian agar diketahui perkembangan pengungkapan ISR dari tahun ke tahun.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian relatif pendek hanya tiga tahun, sehingga analisis perkembangan tingkat keluasan kurang mendalam.
2. Belum sempurnanya hasil *skoring*, disebabkan adanya beberapa item tidak mungkin dipenuhi oleh Bank Umum Syariah dikarenakan belum ada peraturan yang baku terkait item ISR.
3. Adanya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan, sehingga dalam penentuan indeks tersebut, untuk item ISR yang sama dapat berbeda jumlah antar setiap peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2010.
- Amal. *Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. 2011.
- Ananda, Rusydi. *Statistik Pendidikan*. Medan: CV. Widya Puspita. 2018
- Chapra, Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya : Risalah Gusti, Cet. 2.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Desy dan Yane. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan yang Listing di BEI*. Jurnal. Institut Manajemen Telkom. 2012.
- Dwi, Lutfan. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.
- Efferin, Sujuko et.al. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Fauziah, et.al. *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Fitria dan Dwi. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*. Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Jendral Sudirman. 2010.
- Gestari, Intan. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Haridatma, Winda Siti. *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Indra, Gugik. *Pengaruh Elemen Good Corporate Governance terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility*. Jurnal Ekonomi. Universitas Dian Nuswantoro. 2012.
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Khasanah dan Yulianto. *Islamic Corporate Governance dan pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank umum syariah*. Jurnal akuntansi. 2015.
- Khoirudin, Amirul. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2013.
- Masykuroh. *Eksistensi DPS Dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan, Kinerja Keuangan Dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Al-Tahrir Vol. 12, 1 Mei 2012.
- Nanda Savira, Mariska. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institutional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2015.
- Nugraheni dan Dwi Yuliani. *Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam vol. 10 No. 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.
- Nurazizah, Annisa. *Pengaruh Mekanisme Tata Kelola dan Prediksi Kebangkrutan Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi. Universitas Islam Bandung. 2016.

- Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diakses melalui situs <https://www.ojk.go.id>.
- Pratiwi, Astiti. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Putri, Erdhina. *Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman Antar Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro. 2013.
- Santoso, Singgih. *Metode Penelitian Kuantitatif Plus Aplikasi Program SPSS*. Ponorogo: Pusat Penerbitan Fakultas Ekonomi (P2-FE) Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2010
- Sugianto dan Nurlaila. *The Integration of Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) In Islamic Bank Financial Statement. Proceedings of ICGA*. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabet. 2007
- Suharyadi dan Purwanto. *Statistika : Untuk Ekonomi dan keuangan modern edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Surya, Indra. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Susanti, Susi. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics and Household*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 2013.
- Umar, Husein *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke 2.
- Widianto, Hari. *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktivitas, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report*. Skripsi. Universitas Diponegoro. 2011.

Yusuf, Bachtiar. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Periode 2012-2014*. Skripsi. STAIN Pekalongan. 2016.

Zamir dan Abbas. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta : Fajar Interpratama Offset. 2008.

[www.academia.edu/documents/32551370/Good\\_Corporate\\_Governance](http://www.academia.edu/documents/32551370/Good_Corporate_Governance).

<http://susanto-edogawa.blogspot.com/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html>

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Nia Faradilla  
NIM : 51141064  
Tempat/ Tanggal Lahir : Payageli, 25 Juni 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Binjai Km. 10 Gg. Damai Lr. VII Rotan

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tamatan SD NEGERI 101731 Kp. Lalang Berijazah Tahun 2008

Tamatan MTsN Binjai Berijazah Tahun 2011

Tamatan MAN BINJAI Berijazah Tahun 2014

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar *Item Of Disclosure* ISR

<i>Item of Disclosure</i>		<b>Pengertian</b>
<b>1</b>	<b>Pendanaan dan Investasi (<i>Finance and Investment</i>)</b>	
1	Aktivitas Riba	Aktivitas bank yang tidak sesuai dengan ketentuan islam meliputi pendapatan non halal (pendapatan bunga dan beban bunga) dari bank konvensional
2	Gharar	Aktivitas bank yang mengandung ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi
3	Zakat	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri
4	<i>Policy on Late Repayments and insolvent client/bads debt written off</i>	Kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan piutang tak tertagih
5	<i>Current value balance sheet</i>	<i>CVBS sebagai pengganti Balance Sheet</i>
6	<i>Value added statement</i>	Pernyataan nilai tambah bank

2	<b>Produk dan Jasa (Product and Service)</b>		
	7	Produk ramah lingkungan	Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau ( <i>green lending</i> ). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitor yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.
	8	Status halal atau syariah dalam produk	Penjelasan produk bank (produk pembiayaan dan pendanaan) yang ditawarkan
	9	Keamanan dan kualitas produk	Keakuratan produk bank
	10	Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku	Pengaduan pelanggan yang disebabkan oleh ketidakpuasan pelanggan akan pelayanan
3	<b>Karyawan (Employee)</b>		
	11	Karakteristik pekerjaan	Sifat pekerjaan, jam kerja perhari, cuti kesehatan, tahunan dan kesejahteraan, gaji, jumlah pekerja dan kebijakan untuk karyawan
	12	Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan karyawan untuk mengembangkan potensi dan jenjang karir

13	Kesempatan yang sama	Karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan reward, punishment, pelatihan dan pengembangan karir.
14	Keterlibatan Karyawan	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan, Misalnya: mengambil keputusan diperusahaan saham harus meminta pendapatan/persetujuan dari pemegang saham yang lain, yang notabene banyak pemegang sahamnya
15	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kebijakan yang dibuat oleh bank mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan saat bekerja
16	Lingkungan kerja	Gambaran mengenai lingkungan tempat bekerja karyawan
17	Perekrutan khusus	Pekerjaan khusus lainnya-kelompok tertentu (yaitu cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)
18	Sholat berjamaah antar pejabat tertinggi dengan tingkat manajer tingkat bawah dan menengah	
19	Karyawan muslim diizinkan sholat wajib selama waktu dan puasa tertentu selama bulan Ramadhan	
20	Tempat ibadah untuk karyawan	

4	<b>Sosial (<i>Community Involvement</i>)</b>		
21	Pemberian Donasi (Sodaqoh)	Jumlah shodaqoh atau donasi yang digunakan untuk kegiatan social	
22	Wakaf	Jumlah wakaf yang digunakan untuk kegiatan social	
23	Pinjaman untuk kebaikan (Qardh Hassan)	Dana kebajikan yang diperoleh dari denda, pendapatan non halal, dan shodaqoh yang digunakan untuk kegiatan sosial	
24	Sukarelawan dari kalangan karyawan	Keikutsertaan karyawan dalam kegiatan social	
25	Pendidikan	Kegiatan sosial dalam bidang pendidikan, misalnya Pemberian beasiswa, pendirian sekolah	
26	Lulusan pekerja	Lulusan kerja	
27	Kegiatan kepemudaan	Berkaitan dengan pengembangan generasi muda	
28	Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu		

	29	Kepedulian terhadap anak	Bantuan finansial maupun non finansial, misalnya perlindungan dan pemeliharaan anak
	30	Kegiatan sosial lainnya	Aktivitas sosial, misalnya (pemberian buku, mudik bareng, buka puasa bersama saat bulan romadhon
	31	Sponsor kegiatan sosial	Sponsor kegiatan sosial, misalnya kemasyarakatan/kesehatan/olahraga
<b>5</b>	<b>Lingkungan hidup (Environment)</b>		
	32	Konservasi lingkungan	Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan
	33	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah	Bank melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi flora dan fauna yang terancam punah
	34	Pencemaran lingkungan	Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
	35	Pendidikan lingkungan	Kampanye atau sosialisasi mengenai lingkungan
	36	Produk/proses lingkungan terkait	Hubungan produk terhadap lingkungan

	37	Audit lingkungan	Memberikan penilaian untuk menjaga kelestarian lingkungan
	38	Kebijakan manajemen lingkungan	Kebijakan manajemen dalam menjaga kelestarian lingkungan
<b>6</b>	<b>Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)</b>		
	39	Status kepatuhan syariah	Pernyataan dari dewan pengawas syariah
	40	Struktur kepemilikan	Struktur kepemilikan/pemegang saham
	41	Struktur direksi	Struktur direksi perusahaan
	42	Aktivitas terlarang	Aktivitas terlarang, seperti praktek monopoli, iktikar, manipulasi harga, kecurangan dalam bisnis, perjudian
	43	Kebijakan anti korupsi	Kebijakan anti korupsi

Sumber : Othman, R., Md Thani, A., & Ghani, E. K., *Determinants of Islamic social reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia*, *Research Journal of International Studies*, 12: 2009, h. 4-20.



24	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
25	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
26	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
27	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
29	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
30	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
31	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>											
32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>F</b>											
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jlh	21	20	28	27	21	21	27	15	18	21	12
Tot al '15	0,49	0,47	0,65	0,63	0,49	0,49	0,63	0,35	0,42	0,49	0,28

**Lampiran 3 Item Of ISR Perbankan Syariah 2016**

<i>ITEM</i>	2016										
	BC AS	BJ BS	B MI	BN IS	BR IS	BS B	BS M	MAY BS	MEG AS	PANI NS	VI CS
<b>A</b>											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>											
7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
<b>C</b>											
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
16	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D</b>											
21	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
29	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
31	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>E</b>											
32	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
<b>F</b>											
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JLH	23	22	25	28	27	22	27	16	21	22	15
TOTAL '16	0,53	0,51	0,58	0,65	0,63	0,51	0,63	0,37	0,49	0,51	0,35



22	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
26	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
29	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
30	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>											
32	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
35	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
<b>F</b>											
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JLH	23	23	22	29	28	22	27	17	24	24	16
TOTAL '17	0,53	0,53	0,51	0,67	0,65	0,51	0,63	0,4	0,56	0,56	0,37

**Lampiran 5 Jumlah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan DPS**

No	BANK	Tahun	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Komite Audit	DPS
1	BCAS	2015	3	3	3	2
2	BCAS	2016	3	3	3	2
3	BCAS	2017	3	3	3	2
4	BJBS	2015	4	4	5	3
5	BJBS	2016	4	5	4	3
6	BJBS	2017	4	5	4	3
7	BMI	2015	6	5	4	3
8	BMI	2016	4	4	4	3
9	BMI	2017	5	7	4	3
10	BNIS	2015	3	4	4	2
11	BNIS	2016	4	3	4	2
12	BNIS	2017	3	3	4	2
13	BRIS	2015	5	5	5	2
14	BRIS	2016	5	5	5	2
15	BRIS	2017	5	5	5	2
16	BSB	2015	4	4	3	2
17	BSB	2016	4	4	3	2
18	BSB	2017	4	4	3	2
19	BSM	2015	5	7	7	3
20	BSM	2016	5	6	7	3
21	BSM	2017	4	7	7	3
22	MAYBANKS	2015	3	4	3	2
23	MAYBANKS	2016	3	4	4	2
24	MAYBANKS	2017	3	4	4	2
25	MEGAS	2015	3	3	3	3
26	MEGAS	2016	3	3	3	3
27	MEGAS	2017	3	3	3	3
28	PANINS	2015	3	4	3	2
29	PANINS	2016	2	4	3	2
30	PANINS	2017	4	3	3	2
31	VICTORIAS	2015	3	4	3	2
32	VICTORIAS	2016	3	4	3	2
33	VICTORIAS	2017	3	4	3	2

### Lampiran 6 Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial

No	BANK	Tahun	Saham Institusi	Saham Manajerial	Saham Beredar	Keperwakilan Institusional	Keperwakilan Manajerial
1	BCAS	2015	0	0	996300	0.000	0.000
2	BCAS	2016	0	0	996300	0.000	0.000
3	BCAS	2017	0	0	996300	0.000	0.000
4	BJBS	2015	56000000	0	2436000000	0.023	0.000
5	BJBS	2016	56000000	0	4036000000	0.014	0.000
6	BJBS	2017	56000000	0	5092000000	0.011	0.000
7	BMI	2015	9171508490	0	10207702335	0.898	0.000
8	BMI	2016	9171508490	15415	10207702335	0.898	0.000
9	BMI	2017	9171508490	15415	10207702335	0.898	0.000
10	BNIS	2015	0	0	1501500	0.000	0.000
11	BNIS	2016	0	0	1501500	0.000	0.000
12	BNIS	2017	0	0	2501500	0.000	0.000
13	BRIS	2015	1000	0	3958000000	0.000	0.000
14	BRIS	2016	1000	0	3958000000	0.000	0.000
15	BRIS	2017	1000	0	3958000000	0.000	0.000
16	BSB	2015	1130000000	0	9698137000	0.117	0.000
17	BSB	2016	1130000000	0	11698137000	0.097	0.000
18	BSB	2017	1130000000	0	17698137000	0.064	0.000
19	BSM	2015	0	0	397804387	0.000	0.000
20	BSM	2016	0	0	397804387	0.000	0.000
21	BSM	2017	0	0	397804387	0.000	0.000
22	MAYBANKS	2015	9451	0	945069	0.010	0.000
23	MAYBANKS	2016	9451	0	945069	0.010	0.000
24	MAYBANKS	2017	9451	0	945069	0.010	0.000
25	MEGAS	2015	1	0	76981400	0.000	0.000
26	MEGAS	2016	1	0	847114000	0.000	0.000
27	MEGAS	2017	1	0	847114000	0.000	0.000
28	PANINS	2015	3900000000	0	9872717000	0.395	0.000
29	PANINS	2016	3900000000	0	9919525410	0.393	0.000
30	PANINS	2017	3900000000	0	10195335256	0.383	0.000
31	VICTORIAS	2015	0	0	160000000	0.000	0.000
32	VICTORIAS	2016	0	0	210000000	0.000	0.000

33	VICTORIAS	2017	0	0	270000000	0.000	0.000
----	-----------	------	---	---	-----------	-------	-------

### Lampiran 7 DAR

No	BANK	Tahun	Total Hutang	Total Aset	DAR
1	BCAS	2015	393622629885	4349580046527	0.090
2	BCAS	2016	419533187553	4995606338455	0.084
3	BCAS	2017	746348856644	5961174477140	0.125
4	BJBS	2015	525022661	6439966411	0.082
5	BJBS	2016	940848054	7441652530	0.126
6	BJBS	2017	830939695	7713558123	0.108
7	BMI	2015	8952097186	57172587967	0.157
8	BMI	2016	9476756018	55786397505	0.170
9	BMI	2017	9985546831	61696919644	0.162
10	BNIS	2015	3310505	23017667	0.144
11	BNIS	2016	4684758	28314175	0.165
12	BNIS	2017	6612712	34822442	0.190
13	BRIS	2015	6421537	24230247	0.265
14	BRIS	2016	8464428	27687188	0.306
15	BRIS	2017	9100455	31543384	0.289
16	BSB	2015	876238579155	5827153527325	0.150
17	BSB	2016	1314314270143	7019598576013	0.187
18	BSB	2017	1533215277469	7166257141367	0.214
19	BSM	2015	9883107046834	70369708944091	0.140
20	BSM	2016	11232796484546	78831721590271	0.142
21	BSM	2017	13531435	87939774	0.154
22	MAYBANKS	2015	275450	1743439	0.158
23	MAYBANKS	2016	323237	1344720	0.240
24	MAYBANKS	2017	405293	1275648	0.318
25	MEGAS	2015	934524243	5559819466	0.168
26	MEGAS	2016	653977609	6135241922	0.107
27	MEGAS	2017	1301751930	7034299832	0.185
28	PANINS	2015	841347824	7134234975	0.118
29	PANINS	2016	1019132249	8757963603	0.116
30	PANINS	2017	654019857	8629275047	0.076
31	VICTORIAS	2015	111207780621	1379265628942	0.081
32	VICTORIAS	2016	232054716027	1625183249354	0.143
33	VICTORIAS	2017	208433250481	2003113721655	0.104

### Lampiran 8 Indeks ISR

No	BANK	Tahun	Islamic Social Reporting
1	BCAS	2015	0.490
2	BCAS	2016	0.535
3	BCAS	2017	0.535
4	BJBS	2015	0.470
5	BJBS	2016	0.512
6	BJBS	2017	0.535
7	BMI	2015	0.650
8	BMI	2016	0.581
9	BMI	2017	0.512
10	BNIS	2015	0.630
11	BNIS	2016	0.651
12	BNIS	2017	0.674
13	BRIS	2015	0.490
14	BRIS	2016	0.628
15	BRIS	2017	0.651
16	BSB	2015	0.490
17	BSB	2016	0.512
18	BSB	2017	0.512
19	BSM	2015	0.630
20	BSM	2016	0.628
21	BSM	2017	0.628
22	MAYBANKS	2015	0.350
23	MAYBANKS	2016	0.372
24	MAYBANKS	2017	0.395
25	MEGAS	2015	0.420
26	MEGAS	2016	0.488
27	MEGAS	2017	0.558
28	PANINS	2015	0.490
29	PANINS	2016	0.512
30	PANINS	2017	0.558
31	VICTORIAS	2015	0.280
32	VICTORIAS	2016	0.349



## LAMPIRAN 9 Contoh Hasil Item of ISR Bank Muamalat Indonesia tahun 2015

### 1. Aktivitas Riba

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN  
DANA KEBAJIKAN  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2015  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
STATEMENT OF SOURCES AND USES  
OF QARDHUL HASAN FUNDS  
For the Year Ended  
December 31, 2015  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2015	Catatan/ Notes	2014	
Sumber Dana Kebajikan				Sources of Qardhul Hasan Funds
Denda	4.228.709		2.336.945	Penalty
Pendapatan non-halal (Catatan 5)	1.460.868		1.637.005	Non-halal income (Note 5)
	<u>5.689.577</u>		<u>3.973.950</u>	
Penggunaan Dana Kebajikan				Uses of Qardhul Hasan Funds
Sumbangan	5.689.577		3.973.950	Donation
Surplus	-		-	Surplus
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	-	2a	-	Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	-	2a	-	Qardhul Hasan Funds at End of the Year

### 2. Zakat

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  
DANA ZAKAT  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2015  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION  
OF ZAKAT FUNDS  
For the Year Ended  
December 31, 2015  
(Expressed in thousands of Rupiah,  
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2015	Catatan/ Notes	2014	
Sumber Dana Zakat				Sources of Zakat Funds
Internal Bank (Catatan 29)	1.429.334		11.896.166	Internal Bank (Note 29)
Eksternal Bank	11.103.742		10.027.134	External Bank
	<u>12.533.076</u>		<u>22.723.300</u>	
Penyaluran Dana Zakat				Distribution of Zakat Funds
Baitul Maal Muamalat (BMM)	12.533.076		19.154.449	Baitul Maal Muamalat (BMM)
Dompot Dhuafa	-		1.109.617	Dompot Dhuafa
Rumah Zakat	-		1.109.617	Rumah Zakat
BADNAS	-		1.109.617	BADNAS
	<u>12.533.076</u>		<u>22.723.300</u>	
Surplus	-		-	Surplus
Sumber Dana Zakat pada Awal Tahun	-	2a	-	Sources of Zakat Funds at Beginning of the Year
Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun	-	2a	-	Sources of Zakat Funds at End of the Year

### 3. CVBS

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Tanggal 31 Desember 2015  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
 As of December 31, 2015  
 (Expressed in thousands Rupiah,  
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2015	31 Desember/ December 31, 2014 <sup>1)</sup>	31 Desember/ 1 Januari/ December 31, 2014 <sup>2)</sup>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>KAS</b>	2a.3	1.184.387.012	1.148.487.527	988.045.042	<b>CASH</b>
<b>GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA</b>	2a.2d.4	5.348.205.802	8.558.893.156	4.889.489.818	<b>CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA</b>
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	2a.2c, 2d.5				<b>CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS</b>
Pihak ketiga		1.305.180.189	970.114.538	670.502.302	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.178.258)	(1.553.481)	(2.441.041)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>		<b>1.333.923.931</b>	<b>968.561.047</b>	<b>668.061.261</b>	<b>Net</b>
<b>PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>	2c, 2f.6				<b>PLACEMENTS WITH OTHER BANKS</b>
Pihak ketiga		23.290.313	85.500.313	28.862.813	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(545.581)	(236.000)	(681.368)	Allowance for impairment losses
<b>Neto</b>		<b>22.744.732</b>	<b>85.264.313</b>	<b>28.181.445</b>	<b>Net</b>
<b>INVESTASI PADA SURAT</b>	2a, 2g.7				<b>INVESTMENT IN</b>

### 4. Status halal atau syariah dalam produk

## Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

### Statement of The Sharia Supervisory Board

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia semester I dan II tahun 2015, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Laporan Keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

On the basis of results of evaluation and observation conducted in the course of supervisory duties by the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Muamalat Indonesia in Semester I and II of 2015, we hereby declare the following:

1. The operational and products manual, which include the collection and disbursement of funds is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board (DSN) and the decision of the Sharia Supervisory Board (SSB).
2. The implementation of products and services, which include collection and disbursement of funds, is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board (DSN) and the decision of the Sharia Supervisory Board (SSB).
3. The Company's financial report has been prepared and presented in accordance with the Sharia principles.

Hereby we convey that this statement is made in accordance to the prevailing regulations.

## 5. Keamanan dan kualitas produk

# Produk dan Layanan

## Products and Services

### PENDANAAN

#### A. Giro Muamalat

- 1. Giro Ultima**  
Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah perorangan.
- 2. Giro Attjary**  
Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi institusi yang memiliki legalitas badan.

#### B. Tabungan

- 1. Tabungan iB Muamalat**  
Tabungan dalam mata uang Rupiah yang dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/ Debit yaitu Kartu Shar-E Regular dan Shar-E Gold.

### FUNDING

#### A. Giro Muamalat

- 1. Giro Ultima**  
Is sharia checking account in Rupiah and US Dollar which facilitates all kinds of needs of Customer's personal business transactions and financial transactions. This checking account is intended for individuals.
- 2. Giro Attjary**  
Is sharia checking account in Rupiah and US Dollar which facilitates and supports all types of corporate customer's business transactions needs. This checking account is intended for institutions that have a legal entity.

#### B. SAVINGS

- 1. Tabungan iB Muamalat**  
Is a Rupiah-denominated saving account that can be used for various types of transactions, provide easy access, as well as extensive benefits. Muamalat Savings now comes with two choices of ATM/Debit Card: Shar-E Regular and Shar-E Gold.

## 6. Keluhan Pelanggan

edukasi publik mengenai perbankan dan keuangan syariah bagi konsumen perbankan maupun kalangan masyarakat umum. Kemudian, Bank Muamalat Indonesia berupaya menjaga kepuasan nasabah selama menggunakan produk atau layanan Bank Muamalat Indonesia tersebut, termasuk dengan menyediakan sarana pelaporan dan penanganan pengaduan nasabah atas kualitas produk atau layanan perbankan Bank Muamalat Indonesia.

### 1. Penanganan Pengaduan Nasabah

Bank Muamalat Indonesia telah mengoperasikan sebuah sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif, sistematis dan responsif guna memastikan bahwa setiap pengaduan nasabah terkait dengan pemakaian produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Nasabah dapat menyampaikan pengaduannya melalui jalur yang disediakan (petugas *customer service* di cabang atau telepon/e-mail ke SalaMuamalat). Pengaduan nasabah kemudian akan diteruskan ke unit-unit kerja Bank Muamalat Indonesia yang terkait untuk ditindak lanjuti, dan hasilnya disampaikan kembali kepada nasabah melalui sistem sesuai dengan standar *Service Level Agreement* (SLA) yang ada.

Penanganan pengaduan dapat dilakukan di kantor cabang maupun unit kerja di Kantor Pusat. Penanganan

consumer and among the general public. Furthermore, Bank Muamalat Indonesia seeks to maintain customer satisfaction while using the products or services of Bank Muamalat Indonesia, including by providing a means of reporting and handling of customer complaints on the quality of banking products or services of Bank Muamalat Indonesia.

### 1. Handling of Customer Complaint

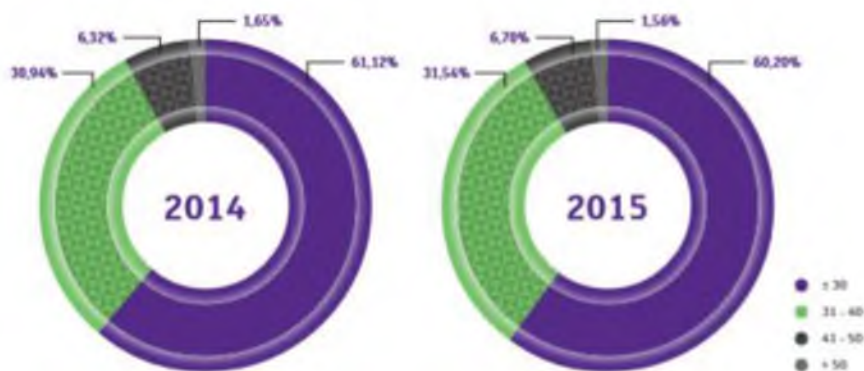
Bank Muamalat Indonesia has operated a comprehensive, systematic and responsive customer complaint handling system to ensure that every customer complaints related to the use of Bank Muamalat Indonesia's products and services can be addressed and resolved. Customers can submit their complaints via the supplied channels (customer service representative at branch offices or phone/ e-mail to SalaMuamalat). Customer complaints will then be forwarded to the related work units of Bank Muamalat Indonesia to be followed-up, and the result will be re-conveyed to the customer through the system in accordance with the existing *Service Level Agreement* (SLA) standards.

Handling of complaints can be carried out at the branch office or work units at the Head Office. The handling of

## 7. Karakteristik Pekerjaan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia**  
Employee Composition Based on Age

No.	Usia   Age	2014	2015
1	≤ 30	4,046	3,855
2	31 - 40	2,049	2,020
3	41 - 50	418	430
4	> 50	109	100
Total		8,622	6,405



**Komposisi Karyawan Berdasarkan Status**  
Employee Composition Based on Status

No.	Status Karyawan Employees Status	2014	2015
-----	-------------------------------------	------	------

## 8. Pendidikan dan pelatihan

### 3. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Bank Muamalat Indonesia melaksanakan program-program pelatihan dan pendidikan karyawan secara teratur untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Pada

### 3. Employee Training and Development Program

Bank Muamalat Indonesia implements employee training and education programs on a regular basis to support its business activities. In 2015, for example,

## 9. Kesempatan yang sama

Para calon officer tersebut juga mengikuti program *Unleash Muamalat Spirit*, suatu program pengembangan sikap, mental dan disiplin diri dengan sistem pendidikan militer yang diadakan oleh Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Kopassus Angkatan Darat.

Kategori *training* internal ini dibagi menjadi 5 (lima) program, yaitu:

- a. *Core Training Program* yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan disemua level.
- b. *Leadership & Management Program* yaitu *training soft skill* yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan *leadership* dan manajerial karyawan.
- c. *Business Training Program* yaitu *training* yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, seperti *Funding dan Financing*.
- d. *Operation Program* yaitu *training* yang berkaitan dengan bidang operasional perusahaan.
- e. *Supporting Training Program* yaitu *training* yang berkaitan dengan fungsi *supporting* dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.

The officer candidates also participated in the Unleash Muamalat Spirit program, a behavioral, mental, and self-discipline development program with a military education system which was organized by Bank Muamalat Indonesia in cooperation with the Special Forces of the Army.

There are 5 (five) different programs in the internal training category, namely:

- a. Core Training Program: mandatory training for all employees at all levels.
- b. Leadership & Management Program: soft skill training to improve leadership and managerial capabilities of employees.
- c. Business Training Program: business activity-related training, such as Funding and Financing.
- d. Operation Program: training in areas of operations.
- e. Supporting Training Program: support function-related training in order to facilitate business activities at branches, comprising of sections and divisions.

## 10. Kesehatan dan keselamatan kerja

### 6. Kesejahteraan Karyawan

Sesuai dengan peraturan, Bank Muamalat Indonesia telah mengikutkan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan.

Selain itu, pada tahun 2015 Bank Muamalat Indonesia telah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi kesehatan terkemuka untuk memberikan manfaat pelayanan rawat-jalan dan rawat-inap bagi para karyawan dan anggota keluarga karyawan. Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan karyawan seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

### 6. Employee Welfare

In accordance with the regulations, Bank Muamalat Indonesia has included all its employees in the BPJS Health program.

In addition, in 2015 the Bank Muamalat Indonesia has established cooperation with one of the leading health insurance company to provide outpatient and inpatient benefits for employees and family members of employees. Efforts to improve the welfare of employees are expected to eventually have an impact on the improvement of work productivity.

11. Pemberian Donasi (shodaqoh), pinjaman untuk kebaikan (qardh), Sukarelawan dari kalangan karyawan, Pendidikan, kegiatan kepemudaan, kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, kepedulian terhadap anak, kegiatan sosial lainnya, sponsor kegiatan sosial.

II PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN SOCIAL COMMUNITY DEVELOPMENT			
<b>1 EKONOMI   ECONOMIC</b>			
<b>a. Gerakan Cinta Masjid</b>			
	119.354.600		
<b>a.1. Launching Gerakan Cinta Masjid (GCM)</b>			
	35.850.000	652.278.500	375.000.000
<b>b. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUMS) Micro Small Community for Muamalat Based Entrepreneur</b>			
	270.833.767	7.550.000	
<b>c. Bina Desa Muamalat Muamalat Village Development</b>			
	479.103.152	193.886.290	
<b>d. Balai Mikro Muamalat Muamalat Micro Gallery</b>			
	124.882.000		
<b>2 PENDIDIKAN   EDUCATION</b>			
<b>a. Balai Sains Muamalat Muamalat Champion Citi</b>			
	434.000.000		
<b>b. Bantuan Pendidikan untuk 15 sekolah di Medan Educational Aid for 15 schools in Medan</b>			
			75.000.000
<b>c. Campaign "Ayo Senggang" Mempertigai 1 Muharram Campaign on "ayo senggang" in commemorating of 1 Muharram</b>			
			28.835.700
<b>d. Muamalat "Lawatins for Masy"</b>			
			08.772.800
<b>e. Program Beasiswa Muamalat 1 Muamalat Scholarship Program 1</b>			
	1.263.620.000		
<b>f. Program Beasiswa Muamalat 2 Muamalat Scholarship Program 2</b>			
	8.352.408.600	8.000.000	
<b>g. Program Beasiswa Muamalat 3 Muamalat Scholarship Program 3</b>			
	308.000.000		
<b>3 HUMANISIAAN   HUMANITY</b>			
<b>a. Aksi Tanggap Muamalat   Muamalat Rapid Response</b>			
- Penanganan korban banjir di Jakarta & Bekasi Assistance for the flood victims at Jakarta & Bekasi			
	60.000.000	1.000.000	
- Penggalangan dana untuk warga Palestina Fund Raising for Palestine			
- Shalat Istisqa semesta di cabang Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia Shalat ul Istisqa together at Bank Muamalat Indonesia's branch offices throughout Indonesia			
- Bantuan masker untuk korban dan masyarakat di zona 1 dan 5 Rantor Cabang yang Terkena Dampak Kabut Asap Distribute Mask for Customers and Communities living in Zone 1 in 5 Branch Offices that were affected by smog disaster			
	28.000.000	900.000	10.000.000
<b>b. Aksi Sehat Muamalat   Muamalat Health Action</b>			
- Hibahan masker di Lembang Bandung, Medan, dan Pondok Kopi Jakarta Timur Mask distribution at Lembang, Bandung, Medan, and Pondok Kopi, Jakarta Timur			
	33.500.000		

No.	PILAR	Sumber Dana Fund Source (Rp)		
		Dana Zakat Karyawan/ Perusahaan/ Company/ Employee Zakat Fund	Dana Non ZIS Non ZIS Fund	Dana CSR CSR Fund
	a. Jalan Sehat bersama 1000 anak binaan BMM pada 14/06 Fun Walk with 1000 children under patronage of BMM on 14/06	42.000.000		
	c. Kegiatan Donor Darah (Rangkaian Milad Muamalat ke-23) Blood Donation Activity (Commemorating Muamalat Anniversary)		7.100.000	11.705.000
	d. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Free Medical Check Up	165.655.000	57.889.700	22.623.000
	e. Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis (RBC) Free Maternity Hospital	589.626.606		
	e.1. Launching Rumah Bersalin Gratis Launching of Free Maternity Hospital			16.625.000
	f. Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan	1.147.319.950	217.798.500	
	g. Bantuan Makan Sahur "Tilak di Masjid Albina GBK Senayan" Donating Sahur "Tilak" at Masjid Albina GBK			10.000.000
	h. Partisipasi Kegiatan IBI "Buka Puasa Bersama & Pemberian Santunan kepada 1500 Anak Yatim" Participating in IBI activities of "Breaking the Fast and Donating 1500 orphans"			20.000.000
	l. Qurban 3 in 1	1.312.000.000		
	l.1. Penyelenggaraan seremonial event Qurban 3in1 Organizing the ceremonial event of Qurban 3in1			18.254.500
	j. Partisipasi Nobar Film Battle of Surabaya Bersama Adik Asuh RISKA dan 300 Anak Yatim Watching "Battle of Surabaya" together with Orphan Fostered Children and 300 orphans			5.000.000
	k. Ambulance Terapung Floating Ambulance	1.189.616.674		
	l. Santunan Tunai Muamalat Muamalat Cash Donation	4.757.670.000	73.912.000	
	m. Berbagi di Akhir Tahun Year End Sharing		63.393.500	
	n. Al-Qur'an Muamalat	175.110.000		
	o. Layanan Husnul Khulimah Muamalat Muamalat Husnul Khulimah Service	19.500.000	17.850.000	

## 12. Lulusan Kerja

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan Employee Composition Based on Education

No	Pendidikan   Education	2014	2015
1	S3	3	3
2	S2	174	152
3	S1	5.834	5.590
4	Diploma	546	599
5	Dibawah Diploma	65	61
	<b>Total</b>	<b>6.622</b>	<b>6.405</b>

## 13. Konservasi lingkungan, pelindungan terhadap flora dan fauna liar, pencemaran lingkungan

LINGKUNGAN HIDUP   ENVIRONMENT			
1	Program Sanitasi Air Bersih "Water Treatment Muamalat Clean Water Sanitation Program "Muamalat Water Treatment	133.250.000	65.892.000
2	Water Well - Cianjur	61.677.581	
3	Penanaman Mangrove di Nusa Dua, Bali Mangrove planting at Nusa Dua, Bali		

#### 14. Status kepatuhan syariah

### Pernyataan Dewan Pengawas Syariah

#### Statement of The Sharia Supervisory Board

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia semester I dan II tahun 2015, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Laporan Keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

On the basis of results of evaluation and observation conducted in the course of supervisory duties by the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank Muamalat Indonesia in Semester I and II of 2015, we hereby declare the following:

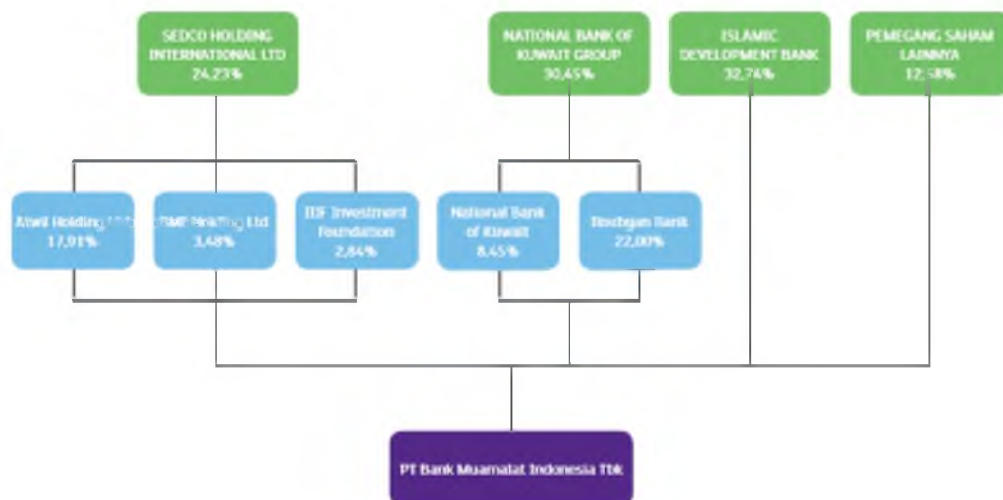
1. The operational and products manual, which include the collection and disbursement of funds is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board (DSN) and the decision of the Sharia Supervisory Board (SSB).
2. The implementation of products and services, which include collection and disbursement of funds, is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board (DSN) and the decision of the Sharia Supervisory Board (SSB).
3. The Company's financial report has been prepared and presented in accordance with the Sharia principles.

Hereby we convey that this statement is made in accordance to the prevailing regulations.

#### 15. Struktur kepemilikan

### Profil Pemegang Saham

#### Shareholder's Profile



## 16. Struktur direksi

No	Nama Anggota Direksi Name of BoD Member	Jabatan Position	Tanggal Efektif Effective Date	Masa Jabatan Term of Period	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
1	Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama President Director	18 September 2014*) September 18, 2014*)	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2014 AGMS at June 23, 2014
2	Evi Anatin Ismail **)	Direktur Kepatuhan Compliance Director	18 September 2014*) September 18, 2014*)	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2014 AGMS at June 23, 2014
3	Indra Yuana Sugianto	Direktur   Director	18 September 2014*) September 18, 2014*)	5 tahun 5 years	RUPS Tahunan Tanggal 23 Juni 2014 AGMS at June 23, 2014
4	Purnomo B. Soetadi ***)	Direktur   Director	Belum Efektif Not Effective	4 tahun 4 years	RUPS B tanggal 7 September 2015 EGMS at September 7, 2014
5	Heri Sjafri ***)	Direktur   Director	Belum Efektif Not Effective	4 tahun 4 years	RUPS B tanggal 7 September 2015 EGMS at September 7, 2014

\*) Persetujuan dari OJK / FSA approved  
 \*\*) Evi Anatin Ismail telah mengundikan diri sejak 23 Februari 2016 dan telah ditunjuk pada RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Mei 2016  
 Evi Anatin Ismail resigned on 23 February 2016, as subsequently appointed by the Extraordinary AGMS on 23 May 2016  
 \*\*\*) Heri Sjafri dan Purnomo B. Soetadi telah memperoleh persetujuan uji kelayakan dan kepatuhan dari OJK sejak 21 Maret 2016  
 Heri Sjafri dan Purnomo B. Soetadi has received fit and proper test approval from the FSA since 21 March 2016

## 17. Aktivitas terlarang

### A. PENDAHULUAN

Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

1. Secara spiritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan taqib (baik) sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah/2: 168 yaitu: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." dan surat Al-A'raf/7: 96 sebagai berikut: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

#### a. Prinsip Dasar Halal

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis. "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain

### A. INTRODUCTION

All parties associated with sharia business should ensure that the principles of Good Governance of the Sharia Business (GGBS) is used as the basis and foundation for every aspect of the business activities conducted. GGBS is based on the spiritual and operational basic foundation.

1. Spiritually, in order to obtain blessing, the sharia business should be based on faith and piety embodied in the commitment towards the two basic principles, halal and Tayib (good) as stated in the words of Allah SWT in the Quran Al-Baqarah/2: 168 namely: "O mankind, eat from whatever is on earth (that is) lawful and good and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy." and Quran Al-A'raf/7: 96 these following: "And if only the people of the cities had believed and feared Allah, We could have opened upon them blessings from the heaven and the earth, but they denied (the messengers), so We seized them for what they were earning."

#### a. The Basic Principle of Halal

Allah SWT commanded his servants to carry out the halal and forbid falsehood in conducting business activities: "And do not consume one another's wealth unjustly or send it (in bribery) to the rulers in order that (they might aid) you (to) consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know (it is unlawful)" (Al-Baqarah/2: 188), both related to the goods and the process of the

## 18. Kebijakan anti korupsi

### 4. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

- a. Revisi prosedur pelaksanaan APU & PPT dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- b. Penyusunan prosedur pelaksanaan pelaporan APU & PPT guna memberikan panduan bagi unit kerja terkait.
- c. *Enhancement* sistem *Anti Money Laundering* (AML) Bank Muamalat Indonesia.
- d. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/*Suspicious Transaction Report* (STR), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)/*Cash Transaction Report* (CTR), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL)/*International Funds Transfer Instructions* (IFTI) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPJT/SIPESAT).
- e. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal antara lain PPATK, KPK, BNN, Kepolisian, DJK, dan pihak eksternal lainnya berupa informasi/ data, pemblokiran, pembukaan blokir, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi.
- f. Peningkatan kualitas data nasabah melalui

### 4. Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU & PPT)

Activities related to the implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (PPT) conducted during 2015 are as follows:

- a. Revised procedures for implementing APU and PPT in order to adapt to the PPATK Chief Regulation No. PER-02/1.02 / INTRAC / 02/15 About User Categories Services Potentially Make Money Laundering (AML).
- b. Preparation of implementation procedures for APU and PPT reporting to provide guidance to related units.
- c. System Enhancement Anti Money Laundering (AML) Bank Muamalat Indonesia.
- d. Implement reporting obligations to INTRAC form Reports Suspicious Transaction (LTKM)/Suspicious Transaction Report (STR), Consolidated Cash Financial Transactions (LTKT)/Cash Transaction Report (CTR), Financial Transaction Reports Transfer Funds From and To Overseas (LTKL)/International Funds Transfer Instructions (IFTI) and Reports Integrated Services User Information System (SIPJT / SIPESAT).
- e. Following a request from external parties, among others INTRAC, KPK, BNN, the Police, the FSA, and other external parties in the form of information/ data, blocking, unblocking the opening, transaction delays and the temporary suspension of the transaction.
- f. Improving the quality of customer data by improving the general terms and conditions of

## HASIL OLAH DATA SPSS 20

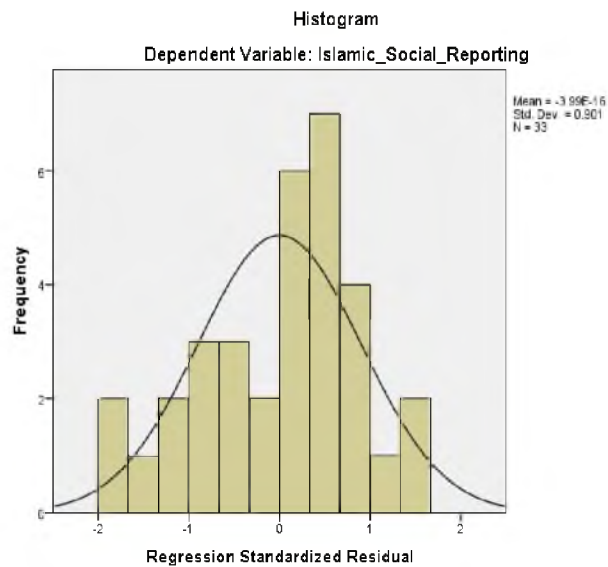
### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

#### Descriptive Statistics

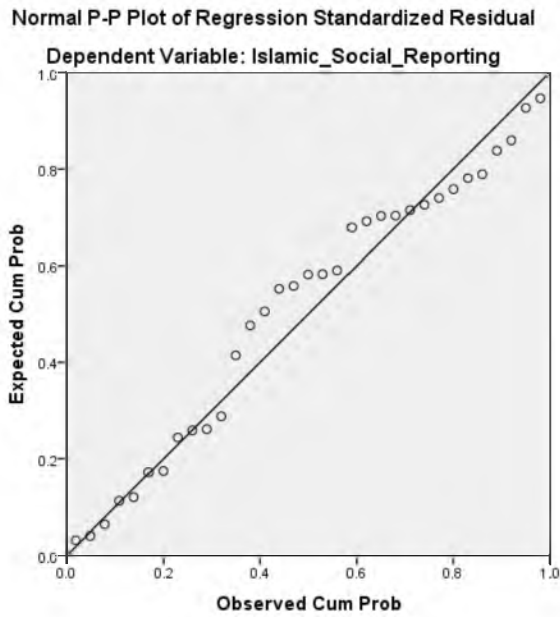
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan_Komisaris	33	2	6	3.73	.911
Dewan_Direksi	33	3	7	4.24	1.173
Komite_Audit	33	3	7	3.91	1.208
Dewan_Pengawas_Syariah	33	2	3	2.36	.489
Kepemilikan_Institusional	33	.000	.898	.12791	.271846
Kepemilikan_Manajerial	33	.0000	.0000	.000000	0E-7
DAR	33	.076	.318	.15952	.064203
Islamic_Social_Reporting	33	.280	.674	.51782	.102145
Valid N (listwise)	33				

### Hasil Uji Normalitas



Gambar 4.1

#### Grafik Histogram



**Gambar 4.2**  
**Grafik Normal P-P Plot**

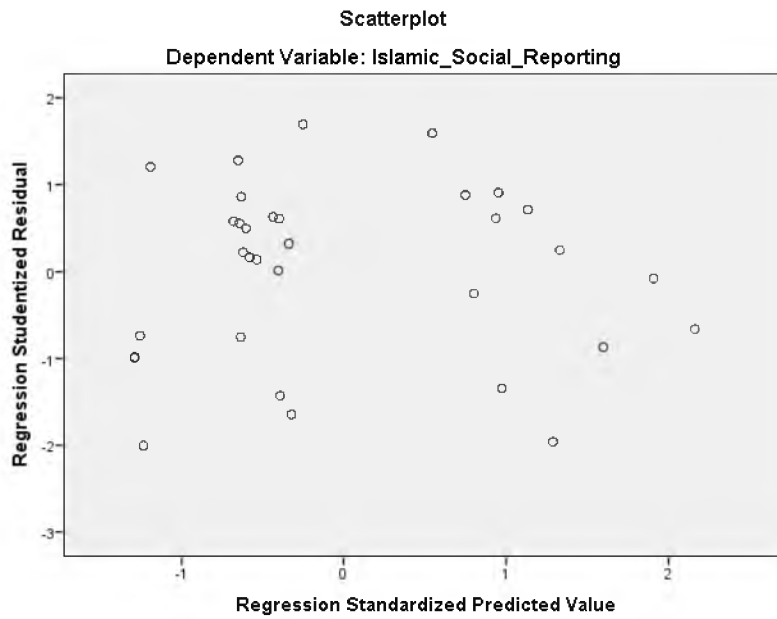
**Tabel 4.2**  
**Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.07262366
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.066
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		.771
Asymp. Sig. (2-tailed)		.593

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 4.3**  
**Grafik Scatterplot**

## Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 4.4**

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.01671
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	17
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

### Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

**Tabel 4.5**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.352	.093		
1 Dewan_Komisaris	.041	.024	.363	<b>1.710</b>	.099
Dewan_Direksi	-.060	.022	-.690	<b>-2.782</b>	.010
Komite_Audit	.074	.023	.881	<b>3.263</b>	.003
Dewan_Pengawas_Syariah	-.012	.037	-.056	<b>-.311</b>	.758
Kepemilikan_Institusional	.117	.068	.312	<b>1.730</b>	.095
DAR	-.065	.257	-.041	<b>-.253</b>	.802

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

### Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

**Tabel 4.6**

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.165	6	.028	4.239	<b>.004<sup>b</sup></b>
Residual	.169	26	.006		
Total	.334	32			

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

b. Predictors: (Constant), DAR, Kepemilikan\_Institusional, Komite\_Audit, Dewan\_Pengawas\_Syariah, Dewan\_Komisaris, Dewan\_Direksi

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.7**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 <sup>a</sup>	<b>.494</b>	.378	.080569

a. Predictors: (Constant), DAR, Kepemilikan\_Institusional, Komite\_Audit, Dewan\_Pengawas\_Syariah, Dewan\_Komisaris, Dewan\_Direksi

b. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

### Hasil Uji Model

**Tabel 4.8**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.352	.093		3.788	.001
Dewan_Komisaris	.041	.024	.363	1.710	.099
Dewan_Direksi	-.060	.022	-.690	-2.782	.010
Komite_Audit	.074	.023	.881	3.263	.003
1 Dewan_Pengawas_Syariah	-.012	.037	-.056	-.311	.758
Kepemilikan_Institusional	.117	.068	.312	1.730	.095
DAR	-.065	.257	-.041	-.253	.802

a. Dependent Variable: Islamic\_Social\_Reporting

### Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman Rho

**Tabel 4.3**

#### Correlations

		Dewan_Ko misaris	Dewan_Dir eksi	Komite_Audi t	Dewan_Penga was_Syariah	Kepemilikan_I nstitusional	Kepemilikan _Manajerial	DAR	Unstandardiz ed Residual
Spear man's rho	Correlation Coefficient	1.000	.676**	.666**	.368*	.197	.	.277	-.002
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.035	.273	.	.119	.993
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.676**	1.000	.685**	.346*	.192	.	.211	-.051
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.049	.285	.	.239	.780
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.666**	.685**	1.000	.382*	-.128	.	.344	.057
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.028	.476	.	.050	.753
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.368*	.346*	.382*	1.000	.130	.	-.112	.007
	Sig. (2-tailed)	.035	.049	.028	.	.470	.	.533	.971
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.197	.192	-.128	.130	1.000	.	-.015	-.123
	Sig. (2-tailed)	.273	.285	.476	.470	.	.	.933	.494
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	.	.	.	.	.
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	.277	.211	.344	-.112	-.015	.	1.000	.110
	Sig. (2-tailed)	.119	.239	.050	.533	.933	.	.	.541
	N	33	33	33	33	33	33	33	33
	Correlation Coefficient	-.002	-.051	.057	.007	-.123	.	.110	1.000
	Sig. (2-tailed)	.993	.780	.753	.971	.494	.	.541	.
	N	33	33	33	33	33	33	33	33

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

